



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah yang sinergis dan terpadu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan; dan
- b. sistematika.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

Renja yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPD yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB IV

RENJA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Renja disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT
DAERAH
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI, Lampiran XXXVII, Lampiran XXXVIII, Lampiran XXXIX,

Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 4 Agustus 2023

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 4 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

EDY SOEPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA

NIP. 19680524199703 1 001

**LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**RENJA KECAMATAN SURUH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa PD harus menyusun Rencana Kerja (Renja) PD. Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) PD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dimana semua Perangkat daerah harus menyusun Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Semua Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun dokumen perencanaan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja serta anggaran/pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta program-program dan kegiatan pembangunan yang terukur disertai pagu indikatif dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tersusunnya RKPD Kabupaten Trenggalek ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

Proses penyusunan Dokumen RKPD disusun melalui pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh suatu dokumen perencanaan yang tidak hanya memenuhi syarat teknis perencanaan, namun juga memperoleh dukungan masyarakat dalam implementasinya. Untuk memperoleh dokumen perencanaan yang disusun secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, maka perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah yang saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi secara bertahap melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa, Kecamatan dan selanjutnya diformulasikan melalui forum Musrenbang RKPD Kabupaten.

Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua stakeholders dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi pengarusutamaan dalam proses penyusunan dokumen ini.

Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini dapat diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Sebagai dokumen resmi daerah, RKPD Kab. Trenggalek Tahun 2024 secara umum mempunyai nilai strategis, antara lain:

- a) Merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
- b) Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) tahun 2024;
- c) Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
- d) Menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024;
- e) Menjadi pedoman dalam mengevaluasi Ranperda tentang APBD;
- f) Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- g) Menjadi instrumen untuk menjamin kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan sedangkan untuk perangkat daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka **Kecamatan Suruh** Kabupaten Trenggalek **sebagai Perangkat Daerah** pada tahun 2024 ini **menyusun Rencana Kerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2024**. Renja PD merupakan dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek tahun 2024 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Prioritas program pelaksanaan Kecamatan Suruh, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011—2031;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024);
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 tanggal 16 Desember 2021, Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 86;
30. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 tanggal 10 Juli 2023. Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 17

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Kecamatan Suruh tahun 2024 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Suruh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Suruh tahun 2024 bertujuan :

1. Sebagai acuan Kecamatan Suruh dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Trenggalek tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
2. Merumuskan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek selama tahun 2024.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Suruh Tahun 2024;

4. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Suruh Tahun 2024;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi, :

- 1.1** Latar belakang, yang memuat latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah
- 1.2** Landasan hukum, yang memuat peraturan perundang-undangan yang mendasari tersusunya Renja Perangkat Daerah
- 1.3** Maksud dan tujuan, memuat maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah
- 1.4** Sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada Bab ini menjelaskan :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah,

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD) sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah (PD) berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,

berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,

berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah (PD), Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD), dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD,

dibagian ini menjelaskan bahwa Renja harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Suruh.

4.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,

dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah (PD) dari penelitian lapangan dan hasil pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,

telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah,

perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah (PD).

3.3. Program dan Kegiatan,

berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Suruh. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indicator lainnya. Penetapan indicator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indicator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran serta evaluasi akuntabilitas keuangan Kecamatan Suruh pada tahun anggaran 2021 dilakukan pada 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan.

3. Evaluasi Program, Kegiatan dan Sasaran Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Tahun 2023

Pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Suruh dibiayai dari APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 2.671.250.969,-** (*Dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah*), yang terdiri dari 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan, dengan rincian realisasi anggaran pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Rincian dan Realisasi Anggaran per-Kegiatan
pada Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2022

Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.524.337.488	2.169.196.222	85,93
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	2.970.000	99,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.284.966.969	1.934.323.349	84,65
Administrasi Umum Perangkat Daerah	102.161.341	102.032.925	99,87
Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.684.010	3.680.000	99,89
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.924.960	62.002.448	98,53
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.600.208	64.187.500	94,95
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	106.730.163	105.610.200	98,95
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.000.000	14.348.750	95,66
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.000.000	977.250	97,73
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	17.386.844	17.380.000	99,96
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	73.343.319	72.904.200	99,40
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	13.945.009	13.553.250	97,19
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	13.945.009	13.553.250	97,19
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	15.099.109	14.515.000	96,13
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.099.109	14.515.000	96,13
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.139.200	11.072.900	99,40

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.139.200	11.072.900	99,40
Jumlah	2.671.250.969	2.313.947.572	86,62

Capaian Kinerja Ouput dari 13 (Tiga Belas) Kegiatan Belanja yang dilaksanakan pada tahun 2022 oleh Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek sebagaimana dirinci pada table 2.2 di bawah ini

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Output Kegiatan
Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2022

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Indikator Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 dokumen	8 dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	94,70%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	98,91%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100%	100 %
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100%	82,35%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	100%
7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	12 dokumen	12 dokumen
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang disusun	12 dokumen	12 dokumen
9	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang disusun	12 dokumen	12 dokumen
10	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	12 dokumen	12 dokumen
11	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang disusun	12 dokumen	12 dokumen

12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun	12 dokumen	12 dokumen
13	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	12 dokumen	12 dokumen

Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023	
		Target 2023	Pagu Indikatif
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			2.486.253.481
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	2.364.253.481
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	3.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	1.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26 Laporan	1.500.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	2.153.587.681
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	2.096.805.681
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 Dokumen	54.282.000

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	347 Dokumen	1.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38 Laporan	1.500.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 Laporan	2.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 Laporan	2.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	1.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	59 Dokumen	1.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	77.478.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7.298.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	20.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	2.500.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	23.680.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	17.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	17.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	54.867.800

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	20.655.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	5.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	29.212.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	55.320.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	28.320.000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	5.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	5.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	17.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	92.152.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	2 Dokumen	27.000.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	27.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	12 Dokumen	65.152.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	2.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	63.152.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	9.750.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang disusun	12 Laporan	9.750.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	9.750.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	11.848.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	12 Dokumen	11.848.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.000.000
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	1.848.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	8.250.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	12 Dokumen	8.250.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	45 Dokumen	3.000.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	49 Dokumen	5.250.000
			2.486.253.481

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Trenggalek, pada dasarnya kegiatan Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek adalah sebagai “Pengarah”. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi PD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Suruh sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi Kecamatan Suruh
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tata kelola di kecamatan
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam tata kelola kecamatan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi kecamatan
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan dan sub kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam RPJMD, Renstra maupun dalam RKPD dalam merencanakan kegiatan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi

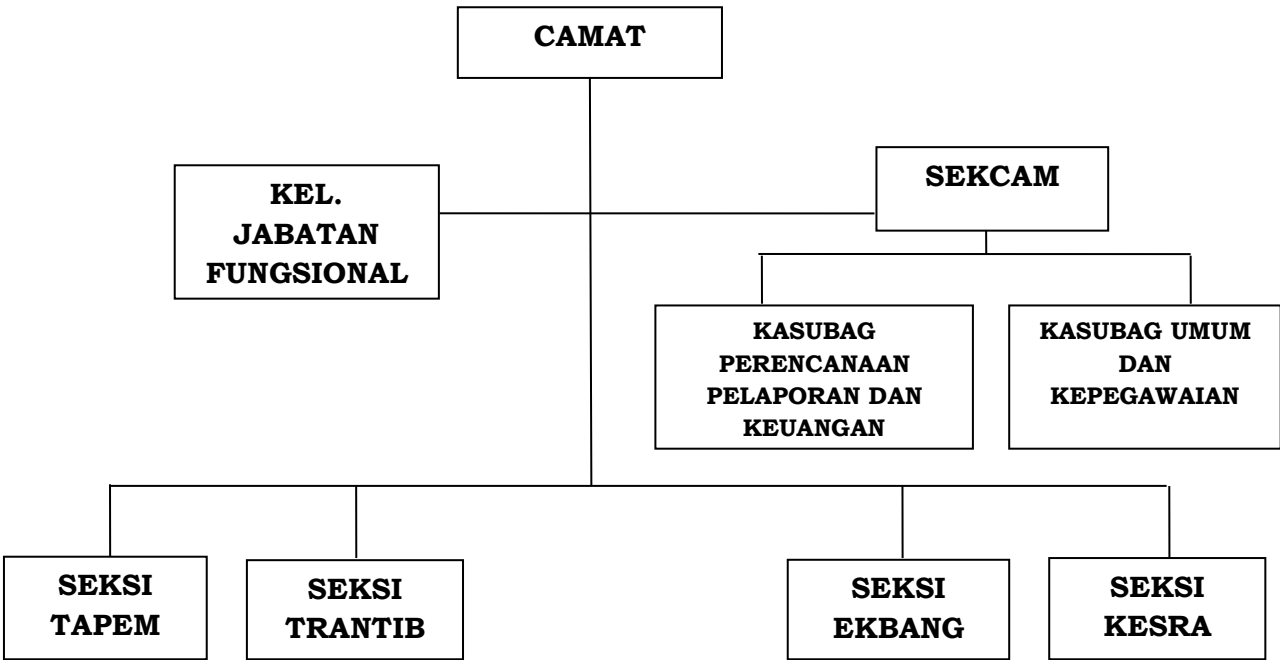
Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan khususnya pada pasal 4 ayat (3) huruf b, maka Kecamatan Suruh masuk dalam klasifikasi Kecamatan dengan beban kerja kecil. Dengan demikian susunan organisasi pada Kecamatan Suruh terdiri atas :

- a. sekretariat, terdiri atas :
 1. sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan; dan
 2. sub bagian umum dan kepegawaian

- b. seksi tata pemerintahan;
- c. seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- d. seksi perekonomian dan pembangunan;
- e. seksi kesejahteraan rakyat; dan
- f. kelompok jabatan fungsional

Struktur Organisasi Kecamatan Suruh digambarkan dalam bagan susunan organisasi sebagaimana tersebut dibawah ini :



Sebagai Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, serta berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan maka Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Camat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, meliputi :
 - 1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
1. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
 2. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
 3. melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 4. melaksanakan tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 5. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat.
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :

1. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 2. melaksanakan koordinasi dengan pemu ka agama dan tokoh masyarakat yang berada diwilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 3. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum kepada Bupati.
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi :
1. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 2. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan
 3. perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Rebulik Indonesia; dan
 4. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
1. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 2. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 3. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, meliputi :

1. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 3. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 4. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa, meliputi :
1. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 2. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 3. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan penggunaan aset desa;
 4. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 5. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 6. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 7. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 8. merekomendasi pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
 9. memfasilitasi perselisihan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 10. memfasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat;
 11. memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan desa;
 12. memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 13. memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 14. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 15. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

16. memfasilitasi kerjasama antardesa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
 17. memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
 18. memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 19. mengoordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
 20. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya; dan
 21. melakukan supervisi RPJM desa, RKP Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi :
1. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 2. melaksanakan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayahnya;
 3. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 4. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 5. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau Bupati. Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Camat juga melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat.

2. Sekretariat mempunyai tugas :

- a. merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Camat dan rencana strategis Kecamatan sebagai pedoman kerja;
- b. mengoordinasikan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur

serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan;

- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Camat dan kegiatan Kecamatan, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan/atau kegiatan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. Melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- e. Menyiapkan bahan pertimbangan DP3 bagi Petugas Lapang PD lain yang berada di Kecamatan;
- f. Melakukan penatausahaan surat menyurat, perlengkapan dan urusan kerumahtanggaan Kecamatan;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi umum dan kepegawaian;

- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

2.2 Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi keuangan;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan dan pelaporan serta administrasi keuangan;
- c. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana program atau/dan kegiatan perencanaan, pelaporan serta administrasi keuangan;
- d. Melakukan kegiatan pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
- e. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Kecamatan;
- f. Melakukan penatausahaan keuangan Kecamatan.
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta penataan hasil kerja perencanaan, pelaporan dan administrasi keuangan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional tata pemerintahan;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan tata pemerintahan;

- c. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan/atau kegiatan tata pemerintahan;
- d. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria tata pemerintahan;
- e. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan administrasi pertanahan/keagrariaan;
- f. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan monografi wilayah Kecamatan;
- g. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi pengangkatan, pemberhentian dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- h. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Keputusan Desa, Peraturan Kepala Desa dan/atau Kepala Kelurahan serta Keputusan Kepala Desa dan/atau Kepala Kelurahan;
- i. Melakukan inventarisasi tanah kas desa dan tunjangan penghasilan aparat Pemerintah Desa;
- j. Menyiapkan bahan pembinaan dan ideologi Negara;
- k. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar desa/kelurahan dan penyelesaian perselisihan sengketa yang terjadi di desa/kelurahan;
- l. Menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi optimalisasi pemanfaatan tanah kas desa dan kekayaan desa lainnya maupun penggalan sumber-sumber pendapatan desa;
- m. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka fasilitasi pengumpulan data kependudukan;
- n. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- o. Membantu penyelenggaraan pemilihan umum (pemilihan Bupati, pemilihan Gubernur, pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif);
- p. Membantu dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

- q. Melakukan pendataan hasil kerja kegiatan pemerintahan desa/kelurahan;
- r. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana program dan/atau kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Menyiapkan data bahan pembinaan dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta komponen Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- f. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan laporan situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban umum.
- g. Menyiapkan data sebagai bahan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan upacara-upacara peringatan hari besar nasional/upacara kenegaraan;
- h. Melakukan serta mengkoordinir pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- i. Membantu pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilihan Bupati, Gubernur, Presiden dan pemilihan Legislatif);

- j. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi penanganan perlindungan masyarakat akibat pelanggaran HAM dan masalah sosial;
- k. Menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan rekomendasi ijin gangguan (HO) dan perijinan lainnya;
- l. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi ketentraman dan ketertiban umum;.
- m. Melakukan pendataan hasil kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- n. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang perekonomian dan pembangunan;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perekonomian dan pembangunan;
- c. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan/atau kegiatan perekonomian dan pembangunan;
- d. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perekonomian dan pembangunan;
- e. Melakukan inventarisasi dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian masyarakat desa/kelurahan, usaha industri kecil dan menengah;
- f. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan pembangunan sarana prasarana desa/kelurahan;
- g. Menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan desa, kelurahan dan/atau kecamatan;

- h. Menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi kegiatan operasional ekonomi pembangunan di wilayah Kecamatan;
- i. Menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi dan pengawasan penyaluran bantuan pembangunan;
- j. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan tata ruang wilayah kecamatan dan penyusunan profil Desa/Kelurahan;
- k. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi perekonomian dan pembangunan;
- l. Melakukan pendataan hasil kerja perekonomian dan pembangunan;
- m. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat yang dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kesejahteraan rakyat;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan kesejahteraan rakyat;
- c. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan/atau kegiatan kesejahteraan rakyat;
- d. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kesejahteraan rakyat;
- e. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan;
- f. Menyiapkan data sebagai bahan dan mengkoordinir pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;

- g. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan penyelenggaraan pendidikan dan keagamaan/kerukunan hidup baik antar umat beragama maupun antar umat beragama dengan Pemerintah;
- h. Menyiapkan data sebagai bahan dan mengkoordinir pelaksanaan pencegahan serta penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi;
- i. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pengiriman, penyaluran dan pendistribusian bantuan-bantuan sosial;
- j. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pendataan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- k. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pembinaan peningkatan kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana (KB);
- l. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi kesejahteraan sosial;
- m. Melakukan pendataan hasil kerja kesejahteraan rakyat;
- n. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2.2 Sumber Daya PD

Kantor Kecamatan Suruh dipimpin oleh seorang Camat (Eselon III A) dan dibantu oleh Sekretaris Kecamatan (Eselon III B), 2 (Dua) orang Kasubag (Eselon IV B) dan 4 (empat) kepala seksi (Eselon IV A) yang dibantu oleh sejumlah staf. Namun pada penyusunan Renja tahun ini Kecamatan Suruh dipimpin oleh Plt. Camat dikarenakan Camat nya Purna Tugas . Adapun susunan kepegawaian Kecamatan Suruh adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4
Susunan Kepegawaian Kecamatan Suruh**

NO	NAMA	PANGKAT / GOL.	JABATAN
1	Wasis Widodo, SP.MAP	Pembina (IV/a)	Sekretaris
2	Paham, S.Sos	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Kesejahteraan

NO	NAMA	PANGKAT / GOL.	JABATAN
			Rakyat
3	Parman, S.Sos	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Ekbang
4	Khiorul Huda, S.STP	Penata (III/c)	Kasi Tata Pemerintahan
5	Budi Cahyono	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Trantib
6	Awaliya Marie Susilowati, S.Pd	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
7	Surahman, S.Pd.	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Umum dan Kepegawaian
8	Widiono	Pengatur (II/c)	Pengolah data
9	Marminten	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Keuangan
10	Sutini	Penata (III/c)	Pengolah data
11	Sumani	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Umum
12	Sudarto	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengolah data
13	Dendik Kuncoro	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengadministrasi Umum
14	Tajuit	Juru Tk. I (I/d)	Pengadministrasi Umum
15	Tulus Wahyu Setiyo Budi	Pengatur (II/c)	Pengolah data
16	Sukarmi	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Umum
17	Erlita Puspitasari		Petugas penunjang
18	Sakti Hendar Fani		Petugas penunjang

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Inovasi dibidang tata kelola kecamatan dengan melibatkan masyarakat untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas- tugas lain yang diberikan pimpinan, serta

tuntutan masyarakat.

2. Kerjasama dan koordinasi lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi tata kelola Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan.
3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk meminimalkan penyimpangan terhadap Visi dan Misi.
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses tata kelola kegiatan di kecamatan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan secara lebih terstruktur.
6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Sarana dan Prasarana

1. Mengembangkan TI serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan di kantor Kecamatan Suruh
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Optimasi dan penggunaan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

Kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana. Isu-isu penting terkait dua faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme bidang pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahn kecamatan , sehingga dapat dihasilkan aparatur kecamatan yang kreatif dan inovatif;
- b) Menerapkan *Right Man On The Right Place* dalam penempatan/perekrutan aparatur. Hal ini berdampak pada ketepatan dan keakuratan pelayanan dan penyelenggara pemerintahan kecamatan , mengingat aparatur yang dimiliki lebih *responsive* terhadap perkembangan kebijakan provinsi dan nasional;
- c) Mengembangkan Teknologi Informasi serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan Kecamatan
- d) Optimalisasi perlengkapan dan peralatan yang memadai, serta penggunaan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan

Berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list ke working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan.

Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan

institusi penyelenggaraan dalam hal ini Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek yang membantu Bupati Trenggalek dalam sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur dan sikap aparatur sangat menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Suruh di Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

- a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
- b) Fasilitasi berbagai forum *multi stakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
- c) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *Focused Group Discussion* (FGD);
- d) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek dalam rangka peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Belum mantapnya mekanisme penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan Kabupaten Trenggalek dengan desa ;
3. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana;
4. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (*shortcutting*);
5. Internal birokrasi : lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar PD, rendahnya kapasitas dan komitmen PD pada proses perencanaan;

6. Internal Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek belum mampu menyediakan standard operating procedure (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel, belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

Adapun permasalahan yang ada di RPJMD Kabupaten Trenggalek Kecamatan berdasarkan urusan pemerintahan adalah sebagai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah yaitu sebagai berikut :

Tabel. 2.5
Permasalahan dan isu Strategis Kecamatan Suruh

No.	Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Isu Strategis
	Kewilayahan Kecamatan	Belum semua masyarakat memiliki dokumen kependudukan dan usaha masyarakat yang berijin	Optimalisasi Pelayanan PATEN di Kecamatan
		Kondusifitas wilayah (rawan Kamtibmas, pandemi covid, rawan bencana, dan kerusakan lingkungan hidup)	Peningkatan Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka penanganan kondusifitas wilayah
		Belum optimalnya pemanfaatan potensi SDA di Kecamatan	Peningkatan Ekonomi berbasis potensi unggulan menjadi platform dan penggerak nilai tambah ekonomi

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (tahap ke 4) yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026 serta RPJMN 2020-2024.

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 tersebut menjadi acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD sebelum nanti akhirnya menjadi dokumen RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

yang disahkan dengan Peraturan Bupati Trenggalek. Sangat dimungkinkan dalam proses berjalan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 menjadi dokumen RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 terjadi perbedaan/pergeseran program/kegiatan beserta pagu anggaran yang disinkronkan dengan program prioritas Provinsi Jawa Timur, Nasional maupun perkembangan di daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tema Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 adalah **“Melestarikan Lingkungan, Mendekatkan Pelayanan dan Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem”**.

Tema RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 di dukung dan dilaksanakan dalam 3 (tiga) Prioritas Pembangunan Daerah yaitu :

- 1) Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat;
- 3) Ekonomi kerakyatan dan jarring pengaman sosial.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Konsep Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2024, berdasarkan aspirasi masyarakat serta berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kecamatan dan MUSRENA KEREN di Kabupaten Trenggalek. Partisipasi dan peran dari semua pihak dalam Rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024.

Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek selaku Perangkat Daerah akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah (PD) maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah (PD) dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Trenggalek, dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Suruh Tahun 2024 direalisasikan melalui Program,

Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana terlampir pada Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Suruh Tahun 2024 ini.

DAFTAR USULAN RENCAA KERJA PEMBANGUNAN (DURKP)
KECAMATAN SURUH KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2024

No.	Prioritas Daerah	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Permasalahan	Kecamatan	Desa	Alamat	Perangkat Daerah Penanggung jawab	No. Urut Usulan
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan												
1	Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Disertai Aksi Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Rekonstruksi Jalan	#MPP Jalan dengan Kondisi Rusak Berat / Peningkatan Jalan Keterangan: 1 RUAS JALAN 957 SURUH _ MLINJON; Jalan ini merupakan akses utama jalan penghubung antara desa Suruh ke Mlinjon dan merupakan akses pendidikan dan ekonomi ke pasar Desa, Jalan dalam keadaan rusak sehingga berbahaya dilewati. Harus segera mendapatkan penanganan untuk menghindari kerusakan yang lebih parah.; usulan diteruskan untuk diproses ketahap selanjutnya, namun harus segera melengkapi data pendukung;	Jalan dalam keadaan rusak sehingga berbahaya dilewati dan merupakan akses utama jalan penghubung antara desa Suruh ke Mlinjon dan merupakan akses pendidikan dan ekonomi ke pasar Desa	Suruh	Suruh	RT.17 RW.07 Dusun Krajan Desa Suruh Kec.Suruh	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1

2	Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Disertai Aksi Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan	#MPP Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan Keterangan: 2 RUAS JALAN 958 GAMPING _BEJI; Kondisi jalan rusak berada di pemukiman padat warga. Merupakan juga jalan penghubung antar desa dan jalur daerah yang akses ekonomi dan pendidikan. Harus segera mendapatkan penanganan untuk menghindari kondisi yang membayakan warga sekitar.; usulan diteruskan untuk diproses ketahap selanjutnya, namun harus segera melengkapi data pendukung;	kondisi jalan rusak yang berada di sekitar rumah pemukiman warga yang merupakan juga jalan penghubung antar desa dan merupakan jalur daerah yang akses ekonomi dan pendidikan warga yang perlunya pembangunan pengaspalan jalan dengan aspal hotmix yang bervolume lebar 3.5 meter di sepanjang jalan 700 meter	Suruh	Gamping	Dusun Karangturi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2
---	---	--	-------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	--	---	-------	---------	------------------	---	---

3	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan	#MPP Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan	Pengerasan Jalan, Desa Wonokerto memiliki 3 Dusun yaitu Krajan, Bangun dan Jirak. di tiga kasunan tersebut masih ada jalan yang membutuhkan pengersan untuk meningkatkan perekonomian warga. (Dsn Krajan 150m, Dsn Bangun 150m Dsn Jirak 150m)	Suruh	Wonokerto	Desa Wonokerto	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3
---	---	--	-------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	--	--	-------	-----------	----------------	---	---

4	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan	#MPP Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan	kondisi jalan di sekitar rumah pemukiman warga yang perlunya perbaikan jalan dengan kondisi jalan rusak ringan dengan pengaspalan hot mix yang bervolume lebar jalan 3 meter di sepanjang jalan 500 meter	Suruh	Gamping	Dusun Gempolan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4
5	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan	#MPP Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan	Jalan Rusak ringan dan merupakan akses pendidikan	Suruh	Suruh	RT.23 RW.09 Dusun Krajan Desa Suruh	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5

6	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Rekonstruksi Jalan	#MPP Jalan dengan Kondisi Rusak Berat / Peningkatan Jalan	Jalan Rusak Berat	Suruh	Mlinjon	Ngumplengan - Mlinjon	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6
7	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Rekonstruksi Jalan	#MPP Jalan dengan Kondisi Rusak Berat / Peningkatan Jalan	jalur antar kecamatan suruh dan dongko saat ini kondisi rusak berat	Suruh	Mlinjon	desa mlinjon sampai desa pringapus	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7
8	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Rekonstruksi Jalan	#MPP Jalan dengan Kondisi Rusak Berat / Peningkatan Jalan	jalur mlinjon pringapus saat ini sudah kondisi rusak berat	Suruh	Mlinjon	desa mlinjon	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8

9	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Rekonstruksi Jalan	#MPP Jalan dengan Kondisi Rusak Berat / Peningkatan Jalan	jalan mlinjon suruh lewat dusun selorejo perlu beton redy mix	Suruh	Mlinjon	desa mlinjon	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9
---	---	--	-------------------------------	---------------------------------------	--------------------	---	---	-------	---------	--------------	---	---

10	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Rekonstruksi Jalan	#MPP Jalan dengan Kondisi Rusak Berat / Peningkatan Jalan	Kondisi jalan Ngrandu-Mlinjon mengalami rusak berat, berlubang dan banyak batu kecil yang beserakan sehingga sangat berbahaya bagi pengendara yang melintas. Dengan pembangunan jalan tersebut diharapkan mampu mempermudah pengendara yang lewat karena jalan tersebut merupakan akses lalu lintas, ekonomi, perdagangan, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Volume kebutuhan 511 m x 3 m.	Suruh	Ngrandu	Desa Ngrandu Kecamatan Suruh	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10
----	---	--	-------------------------------	---------------------------------------	--------------------	---	--	-------	---------	------------------------------	---	----

1 1	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Rekonstruksi Jalan	#MPP Jalan dengan Kondisi Rusak Berat / Peningkatan Jalan	kondisi jalan di sekitar rumah pemukiman warga yang perlunya pembangunan pengerasan jalan dengan kondisi jalan rusak berat dikarenakan jalan amblas dan perlu pembetonan jalan dengan beton readymix yang bervolume lebar 3 meter di sepanjang jalan 300 meter	Suruh	Gamping	Dusun Gandu	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12
--------	---	--	-------------------------------	---------------------------------------	--------------------	---	--	-------	---------	-------------	---	----

1 2	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Rekonstruksi Jalan	#MPP Jalan dengan Kondisi Rusak Berat / Peningkatan Jalan	Jalan raya poros suruh pule merupakan jalan satu satunya akses perekonomian ke kecamatan pule yang kondisi jalannya pada saat ini yaitu rusak berat dengan jalan banyak berlobang dan jalan ambles yang mengakibatkan kondisi jalan miring dan bisa membahayakan pengguna jalan, maka perlu pembeconan jalan dengan beton readymix dengan volume lebar 6 meter di sepanjang jalan 4 km dari titik o batas gamping pule	Suruh	Gamping	Sepanjang Jalan Poros Suruh - Pule	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13
--------	---	--	-------------------------------	---------------------------------------	--------------------	---	--	-------	---------	------------------------------------	---	----

13	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Jalan	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan	Badan jalan sangat curam dan struktur tanah sangat labil sehingga tanah mudah longsor dan sangat berbahaya bagi pengguna jalan maupun rumah disekitar lokasi, sehingga dengan dibangunnya tembok penahan jalan akan berdampak pada keamanan badan jalan selain itu berdampak pada kenyamanan pemakai lalu lintas. Volume kebutuhan 108m x 0,40 x 3 m	Suruh	Ngrandu	RT 12 RW 03 Dusun Crabak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14
----	---	--	-------------------------------	---------------------------------------	--------------------	-------------------------------	--	-------	---------	--------------------------	---	----

14	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Jalan	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan	Saluran drainase yang buruk membuat air meluber ke Jalan, Tebing pinggir jalan sudah memprihatinkan dan membahayakan pengguna jalan sehingga perlu Tembok Penahan.	Suruh	Mlinjon	RT.14, 23, 27, dan 50.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15
15	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	#MPP Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Pipa banyak yang sudah rusak dan bocor sehingga mengakibatkan aliran air tidak lancar. Volume perbaikan perpipaan sepanjang 1500 m dan jumlah Sr sebanyak 50 unit	Suruh	Nglebo	RT 14, RT 13 dan Rt 11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16

1 6	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Jalan	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan	Kondisi badan jalan rusak parah dan longsor, kondisi drainase pun menjadi sangat sempit diakibatkan terkena longSORan dari badan jalan. Jadi dengan di bangunnya tembok penahan jalan dan drainase akan berdampak pada keamanan badan jalan disamping itu berdampak pada kenyamanan pemakai jalan. Volume kebutuhan Tembok penahan jalan 120m x 0,40 m x 2,5 m. Volume kebutuhan Drainase 107m x 0,30m x 0,60 m.	Suruh	Ngrandu	RT 08 RW 02 Dusun Guwo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17
--------	---	--	-------------------------------	---------------------------------------	--------------------	-------------------------------	--	-------	---------	------------------------	---	----

17	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan	Pada ruas jalan Poros Desa ada 2 titik jalan yang ambblas karena adanya gorong gorong yang rusak. Kondsi tersebut bisa membayakan pengguna jalan karena semakin hari jalan ambblas semakin Parah. Untu itu perlu dibangun nGorong Gorong Plat di 2 titik jalan dikasud dengan volume sebagai berikut : 1. Titik 1 (PxLxT) : 6 x 1,5 x 1 M 1. Titik 2 (PxLxT) : 6 x 1 x 1 M	Suruh	Nglebo	RT 10 RW 3	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	18
----	---	--	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------	-------------------------------	--	-------	--------	------------	--	----

18	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Jalan	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan	kondisi jalan yang sangat rawan longsor mengakibatkan perlunya tembok penahan jalan dan ada yang sangat perlu untuk segera dilakukan pembangunan tanggul penahan jalan di desa gamping dengan volume tinggi 4 meter di sepanjang jalan 87 meter	Suruh	Gamping	Dusun Gandu	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19
----	---	--	-------------------------------	---------------------------------------	--------------------	-------------------------------	---	-------	---------	-------------	---	----

19	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Jalan	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan	kondisi jalan yang sangat rawan longsor mengakibatkan perlunya tembok penahan jalan dan ada yang sangat perlu untuk segera dilakukan pembangunan tanggul penahan jalan di desa gamping dengan volume tinggi 6 meter di sepanjang jalan 97 meter	Suruh	Gamping	Dusun Gempolan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20
----	---	--	-------------------------------	---------------------------------------	--------------------	-------------------------------	---	-------	---------	----------------	---	----

20	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Jalan	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan	kondisi jalan yang sangat rawan longsor mengakibatkan perlunya tembok penahan jalan dan ada yang sangat perlu untuk segera dilakukan pembangunan tanggul penahan jalan di desa gamping dengan volume tinggi 5 meter di sepanjang jalan 105 meter	Suruh	Gamping	Dusun Sumberjo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	21
----	---	--	-------------------------------	---------------------------------------	--------------------	-------------------------------	--	-------	---------	----------------	---	----

21	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Jalan	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan	kondisi jalan yang sangat rawan longsor mengakibatkan perlunya tembok penahan jalan dan ada yang sangat perlu untuk segera dilakukan pembangunan tanggul penahan jalan di desa gamping dengan volume tinggi 6 meter di sepanjang jalan 112 meter	Suruh	Gamping	Dusun Karangturi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	22
22	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Jembatan	#MPP Jembatan dengan lebar > 2 m	talut jembatan keropos sehingga mengancam fisik jembatan	Suruh	Mlinjon	RT 10 Desa Mlinjon	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	23

23	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Jembatan	#MPP Jembatan dengan lebar > 2 m	kondisi jembatan yang rusak mengakibatkan tersumbatnya aliran air yang sangat dibutuhkan pembangunan jembatan dengan beton ready mix 2 unit	Suruh	Gamping	Dusun Gandu	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	24
24	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Jembatan	#MPP Jembatan dengan lebar > 2 m	kondisi jembatan yang rusak mengakibatkan tersumbatnya aliran air yang sangat dibutuhkan pembangunan jembatan dengan beton ready mix 3 unit	Suruh	Gamping	Dusun Karangturi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	25

25	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jembatan	#MPP Jembatan dengan lebar > 2 m	kondisi jembatan yang rusak mengakibatkan tersumbatnya aliran air yang sangat dibutuhkan pembangunan jembatan dengan beton ready mix 2 unit	Suruh	Gamping	Dusun Gempolan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	26
26	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jembatan	#MPP Jembatan dengan lebar > 2 m	kondisi jembatan yang rusak mengakibatkan tersumbatnya aliran air yang sangat dibutuhkan pembangunan jembatan dengan beton ready mix 2 unit	Suruh	Gamping	Dusun Sumberjo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	27
27	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jembatan	#MPP Jembatan dengan lebar > 2 m	belum ada jembatan penghubung ukuran 15 m X 4 m	Suruh	Suruh	RT.02 RW.01 Dusun panjen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	28

28	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Jembatan	#MPP Jembatan dengan lebar > 2 m	Kondisi jembatan sangat sempit jadi sangat sulit jika dilewati kendaraan agak besar, jembatan tersebut merupakan akses yang menghubungkan antar desa dan kecamatan. Sehingga dengan dibangunnya jembatan yang lebih layak akan mempermudah akses transportasi. Volume 5 m x 8 m.	Suruh	Ngrandu	RT 12 RW 03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	29
----	---	--	-------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------------------	--	-------	---------	-------------	---	----

29	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Jembatan	#MPP Jembatan dengan lebar > 2 m	Kondisi Jembatan di RT 13 sudah rusak dan lebar belum memadai. Pada dua sayab jembatan ambrol sehingga membahayakan pengguna Jalan. Adapun Volume Jembatan yang diajukan = Panjang 5 M, Lebar 3 M dan Tinggi 3 M	Suruh	Nglebo	RT 13 RW 3 Dsn Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	30
----	---	--	-------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------------------	--	-------	--------	----------------------	---	----

30	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Jembatan	#MPP Jembatan dengan lebar > 2 m	Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendukung pengembangan Pariwisata Desa, perlu dibangun jembatan untuk menghubungkan jalan lingkar yang ada di Wisata Tebing Lingga : Adapun volume Jembatan Tersebut ssb: 1. Panjang 14 meter, Lebar 6 Meter dan Tinggi 3 Meter 2. Perkiraan biaya sebesar 1.200.000.000	Suruh	Nglebo	RT 6 RW 2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	31
----	---	--	-------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------------------	---	-------	--------	-----------	---	----

31	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Jembatan	#MPP Jembatan dengan lebar > 2 m	keadaan jembatan pada lokasi tersebut saat ini sangat tidak layak, kondisi jembatan ambles sehingga sangat membahayakan bagi orang maupun kendaraan yang melintasi (volume 4 unit)	Suruh	Puru	RT 10 dan RT 06 Desa Puru	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	32
32	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	#MPP Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Sungai (Talud, Bronjong)	Kondisi tebing sungai yang semakin terkikis akibat derasnya aliran sungai pada waktu musim hujan masuk ke pemukiman penduduk, sehingga perlunya Talud atau Bronjong guna memperkuat tebing sungai.	Suruh	Mlinjon	RT.5, 14, 39, 24, 27	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	33

33	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	#MPP Meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi	dalam peningkatan saluran perairan sawah warga maka diperlukannya pembangunan irigasi dengan volume panjang 76 meter	Suruh	Gamping	Dusun Gempolan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	34
34	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	#MPP Jaringan Irigasi dengan kondisi rusak berat	Umur saluran irigasi yang sudah terlalu tua dan tanpa ada perbaikan, serta daya rusak dari air, tangan jahil manusia turut serta merusak kondisi saluran irigasi.	Suruh	Mlinjon	Jaringan sekunder Desa Mlinjon	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	35

35	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	#MPP Jaringan Irigasi dengan kondisi rusak berat	belum ada irigasi untuk pengairan	Suruh	Gamping	desa gamping	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	36
36	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	#MPP Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Adanya sumber air yang belum terdistribusi dengan baik.	Suruh	Mlinjo	Dusun Miri	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	37

37	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	#MPP Pembangunan MCK	belum dapat terdani dari APBDesa, (Pembangunan MCK umum fasilitas Wisata Desa)	Suruh	Suruh	RT.01 RW.01 Dusun Panjen (PUJASERA SURINAME)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	38
38	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	#MPP Pembangunan MCK	Belum tersedianya MCK di Pasar Desa Mlinjon membuat pedagang dan konsumen kebingungan ketika ingin BAK atau BAB.	Suruh	Mlinjon	MCK Pasar Desa Mlinjon	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	39

39	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	#MPP Pembangunan MCK	Menggunakan MCK umum dengan sanitasi buruk dapat berdampak pada meningkatnya resiko timbulnya penyakit dan lingkungan yang tidak sehat karena aliran pembuangan yang masih sembarangan. Jadi dengan dibangunnya MCK umum yang layak diharapkan bisa meningkatkan kesehatan dan kebersihan masyarakat. Volume kebutuhan 1 unit 5 m x 3 m.	Suruh	Ngrandu	RT 02 RW 01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	40
----	---	--	--	--	--	----------------------	--	-------	---------	-------------	---	----

40	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	#MPP Pembangunan MCK	untuk mengurangi buang air besar sembarangan maka diperlukannya pembangunan MCK (jambanisasi) di beberapa titik. dan yang perlu untuk pembangunan ada di 50 Unit/ titik lokasi	Suruh	Gamping	Desa Gamping	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	41
41	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	#MPP Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir/ Tempat pembuanagan sampah terpadu/Stasiun Peralihan Antara/Tempat Pengolahan Sementara 3R (Reduce, Reuse, Recycle).	penambahan pembangunan TPS	Suruh	Suruh	Desa Suruh	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	42

4 2	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	#MPP Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir/ Tempat pembuangan sampah terpadu/Stasiun Peralihan Antara/Tempat Pengolahan Sementara 3R (Reduce, Reuse, Recycle).	Sebagian penduduk masih banyak yang membuang sampah ke sungai sehingga menyebabkan pencemaran sungai. Dalam pengelolaan sampah Desa Nglebo perlu diabngau Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) sebanyak 1 unit dengan Volume P= 8 m, L 6 m	Suruh	Nglebo	RT 6 RW 2 Dsn Tawang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	43
4 3	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Sarana Persampahan	#MPP Pengadaan Sarana persampahan sebagai penunjang dalam penampungan dan Pengangkutan sampah (Gerobak sampah, Kendaraan Pengangkut sampah, Tempat Sampah, Kontainer Sampah, dan sarana pendukung lainnya)	sarpras belum terpenuhi. (tong sampah = 214 rumah)	Suruh	Suruh	desa suruh	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	44

4 4	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Sarana Persampahan	#MPP Pengadaan Sarana persampahan sebagai penunjang dalam penampungan dan Pengangkut sampah (Gerobak sampah, Kendaraan Pengangkut sampah, Tempat Sampah, Kontainer Sampah, dan sarana pendukung lainnya)	Kondisi warga masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan pengelolaan sampah yang baik yang tidak mencemari lingkungan, karena masih banyak warga yang membuang sampah disungai dan perilaku masyarakat yang membakar sampah. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya gerobak sampah untuk mengangkut sampah dari rumah warga. Bantuan yang kami ajukan berupa : 1.Kendaraan pengangkut sampah 2 Unit 2 Tempat Sampah Rumah Tangga 600 unit	Suruh	Nglebo	Desa Nglebo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	45
--------	---	--	--	---	-------------------------------	--	---	-------	--------	-------------	---	----

4 5	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	#MPP Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah sesuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota : Rehabilitasi Kantor Camat dan Kelurahan, Sarana Prasarana Kantor Camat dan Kelurahan	"Pembangunan Gedung Serbaguna" di desa wonokerto ada lahan kosong yang sangat strategis untuk di jadikan Gedung Serbaguna sebagai titik kumpul satu lingkup desa atau untuk rapat-rapat tertentu di wilayah Dusun Krajan RT 10/01 tentunya akan menunjang masyarakat jika dijadikan sebuah Gedung Sebaguna. (luas 40x30 m)	Suruh	Wonokerto	Dsn Krajan RT 10/01 Desa Wonokerto	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	46
--------	---	--	----------------------------------	---	--	--	--	-------	-----------	------------------------------------	---	----

46	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	#MPP Pembangunan Jalan Paving skala Lingkungan dan pelengkap nya (TPJ dan Saluran Air)	belum ada TPJ dan mengamankan Jalan ukuran 50 meter	Suruh	Suruh	RT.27 RW.10 Dusun Gading	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	47
47	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dlam daerah Kabupaten /Kota	Pembangunan Sistem Drainase lingkungan	#MPP Pembangunan sistem Drainase lingkungan dan peningkatan saluran drainase lingkungan	masih berbentuk tanah dan membahayakan keamanan bangunan Jalan ukuran 1350 meter	Suruh	Suruh	RT.09,10,11,14 Dusun Jatirejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	48
48	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	#MPP Pembangunan Jalan Paving skala Lingkungan dan pelengkap nya (TPJ dan Saluran Air)	masih berbentuk tanah, ukuran 350 meter	Suruh	Suruh	RT.30 RW.11 Dusun Gading	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	49

49	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	#MPP Pembangunan Jalan Paving skala Lingkungan dan pelengkap nya (TPJ dan Saluran Air)	kondisi rusak berat sehingga berbahaya bagi pengguna jalan, ukuran 450 meter	Suruh	Suruh	RT.21 RW.08 Dusun Krajan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	50
50	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	#MPP Pembangunan Jalan Paving skala Lingkungan dan pelengkap nya (TPJ dan Saluran Air)	kondisi rusak berat sehingga berbahaya bagi pengguna jalan, ukuran 350 meter	Suruh	Suruh	RT.21 RW.08 Dusun Krajan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	51
51	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	#MPP Pembangunan Jalan Paving skala Lingkungan dan pelengkap nya (TPJ dan Saluran Air)	kondisi jalan rusak berat sehingga berbahaya bagi pengguna jalan karena juga merupakan akses bagi anak sekolah dan para petani, ukuran 350 meter	Suruh	Suruh	RT.21 RW.08 Dusun Krajan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	52

52	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	#MPP Pembangunan Jalan Paving skala Lingkungan dan pelengkapnnya (TPJ dan Saluran Air)	kondisi jalan rusak berat, ukuran 350 meter	Suruh	Suruh	RT.21 RW.08 Dusun Krajan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	53
53	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	#MPP Pembangunan Jalan Paving skala Lingkungan dan pelengkapnnya (TPJ dan Saluran Air)	Jalan masih rusak sehingga ketika hujan sangat tidak layak untuk dilewati.	Suruh	Mlinjon	RT.53	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	54
54	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	#MPP Pembangunan Jalan Paving skala Lingkungan dan pelengkapnnya (TPJ dan Saluran Air)	Kondisi Jalan rabat beton sudah rusak berat dan perlu Peningakatan kualitas jalan dengan dibangun Paving Jalan dengan volume : P=8500 m L=3 M.	Suruh	Nglebo	Dusun Salam Desa Nglebo	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	55

55	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	#MPP Pembangunan Jalan Paving skala Lingkungan dan pelengkapny (TPJ dan Saluran Air)	TPJ SMP Gotong Royong 2, di Desa Wonokerto ada SMP Gotong Royong 2 yang bangunanya di atas jalan sehingga saat musim hujan dikawatirkan akan terjadi longsor dan mengakibatkan terganggunya belajar mengajar untuk sekolahan tersebut dan menutup akses jalan untuk masyarakat sekitarnya. lokasi dsn Krajan RT10/01 Ds. Wonokerto. (luas 50m)	Suruh	Wonokerto	Dsn Krajan RT 10/01 Ds. Wonokerto Kec. Suruh Kab Trenggalek	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	56
----	---	---	---	--------------------------------------	--	--	--	-------	-----------	---	--	----

5 6	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	#MPP Pembangunan Jalan Paving skala Lingkungan dan pelengkapya (TPJ dan Saluran Air)	TPT dan Timbunan Lapangan Bola di desa wonokerto terdapat lapangan yang di gunakan masyarakat dalam berbagai kegiatan olahraga, dll. Lapangan tersebut berbatasan dengan lahan warga dan saat musim hujan rawan longsor sehingga memangkas sebagian sisi dari lapangan, lokasi ini sangat membutuhkan Tembok Penahan Tanah. dsn krajan RT 10/01 (p 150m)	Suruh	Wonokerto	Dsn Krajan RT 10/01 Ds. Wonokerto	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	57
--------	---	---	---	--------------------------------------	--	--	--	-------	-----------	-----------------------------------	--	----

57	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	#MPP Pembangunan Jalan Paving skala Lingkungan dan pelengkap nya (TPJ dan Saluran Air)	Pembangunan TPJ Dusun Jirak wilayah dusun jirak desa wonokerto sangat rawan longsor di musim hujan, sehingga saat musim hujan banyak jalan jalan yang terkena longsoran. Dsn Jirak(150m)	Suruh	Wonokerto	Desa Wonokerto	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	58
58	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	#MPP Pembangunan Jalan Paving skala Lingkungan dan pelengkap nya (TPJ dan Saluran Air)	Pembangunan TPJ Dusun Bangun, dusun bangun desa wonokerto saat musim hujan rawan longsor, (150m)	Suruh	Wonokerto	Dsn Bangun Ds Wonokerto	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	59

59	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	#MPP Pembangunan Jalan Paving skala Lingkungan dan pelengkap nya (TPJ dan Saluran Air)	Pembangunan TPJ Lapangan Voly, lokasi Lapangan Voly desa Wonokerto berdekatan dengan SD dan Polindes, Lokasi lapangan lebih tinggi dari sekolahan dan polindes, saat musim penghujan sebagian sisi dari lapangan terkikis dan longsor ke sekolahan dan ke polindes. RT 10/01 Dsn Krajan (150m)	Suruh	Wonokerto	Desa Wonokerto	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	60
60	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	#MPP Pembangunan Jalan Paving skala Lingkungan dan pelengkap nya (TPJ dan Saluran Air)	kondisi jalan masih rusak dan merupakan jalan akses petani. volume panjang 300 meter	Suruh	Gamping	Dusun Sumberjo	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	61

61	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	#MPP Pembangunan Jalan Paving skala Lingkungan dan pelengkapanya (TPJ dan Saluran Air)	kondisi jalan masih tanah dan merupakan jalan akses pendidikan sehingga berbahaya bagi pengguna jalan, ukuran 350 meter	Suruh	Gamping	Dusun Gempolan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	62
62	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dlam daerah Kabupaten /Kota	Pembangunan Sistem Drainase lingkungan	#MPP Pembangunan sistem Drainase lingkungan dan peningkatan saluran drainase lingkungan	masih berupa tanah dan membahayakan keamanan atau terkikisnya bangunan jalan ukuran 500 meter	Suruh	Gamping	Dusun Gandu	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	63
63	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	#MPP Pembangunan Jalan Paving skala Lingkungan dan pelengkapanya (TPJ dan Saluran Air)	Belum ada Tembok Pengaman Jalan dan Membahayakan BagiPengguna Jalan. volume Panjang 50 Meter	Suruh	Gamping	Dusun Karangturi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	64

64	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	#MPP Pembangunan Jalan Paving skala Lingkungan dan pelengkapnnya (TPJ dan Saluran Air)	Jalan yang berbahaya bagi penggunaannya karena belum ada tembok pengaman jalan. volume panjang 100 meter	Suruh	Gamping	Dusun Gempolan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	65
65	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	#MPP Pembangunan Jalan Paving skala Lingkungan dan pelengkapnnya (TPJ dan Saluran Air)	belum ada tanggul penahan jalan.ukuran 250meter	Suruh	Gamping	Dusun Gandu	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	66
66	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	#MPP Pembangunan Jalan Paving skala Lingkungan dan pelengkapnnya (TPJ dan Saluran Air)	Jalan Rusak meruakan akses petani. dengan volume panjang 500 meter	Suruh	Gamping	Dusun Karangturi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	67

67	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	#MPP Pembangunan Jalan Paving skala Lingkungan dan pelengkapanya (TPJ dan Saluran Air)	karena kondisi Desa Gamping berada di pegunungan maka dari itu untuk bisa dibangunnya TPT /Plengsengan sebagai pengaman tebing yang berada di tepi jalan Desa	Suruh	Gamping	Dusun Sumberjo	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	68
68	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	#MPP Pembangunan Jalan Paving skala Lingkungan dan pelengkapanya (TPJ dan Saluran Air)	belum ada TPJ dan membahayakan pengguna jalan	Suruh	Gamping	Desa gamping	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	69
69	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	#MPP Pembangunan Jalan Paving skala Lingkungan dan pelengkapanya (TPJ dan Saluran Air)	kondisi jalan rusak berada di pemukiman warga maka diperlukannya prbaikan untuk jalan paving. panjang jalan 600 meter	Suruh	Gamping	Desa Gamping	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	70

70	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	#MPP Pembangunan Jalan Paving skala Lingkungan dan pelengkap nya (TPJ dan Saluran Air)	kandisi jalan rusak dan membahayakan pengguna jalan yang merupakan akses perekonomian petani. dengan volume jalan panjang 400 meter	Suruh	Gamping	Dusun Gandu	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	71
71	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabuaten/Kota	#MPP Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Pengangkut Sampah	kelompok perempuan bank sampah belum punya kendaraan gerobak roda 3 (kebutuhan 3 unit)	Suruh	Suruh	Desa Suruh	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	72

72	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	#MPP Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Pengangkut Sampah	Untuk mengurangi perilaku masyarakat yang membuang sampah di sungai dan yang membakar sampah, perlu adanya pengelolaan sampah yang baik, dan untuk mendukung hal tersebut perlunya bantuan kendaraan roda tiga sebanyak 2 unit.	Suruh	Nglebo	Desa Nglebo	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	73
73	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	#MPP Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	belum terbangun kendala anggaran (Pembangunan Ruang Terbuka Hijau)	Suruh	Suruh	PUJASERA AIMISYU DESA SURUH	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	74

74	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	#MPP Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Seiring dengan perkembangan Jaman, Pembangunan dan Teknologi, Tempat dan ruang anak untuk bermain telah hilang. Dalam rangka untuk memfasilitasi kebutuhan anak untuk bermain dan belajar perlu dibangun Taman bermain. Kebutuhan Taman Bermain anak dimaksud adalah paket taman dan sarana parasana permainan anak dengan biaya sebesar 100 juta	Suruh	Nglebo	Desa Nglebo	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	75
----	---	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------------	---	-------	--------	-------------	--	----

75	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	#MPP Pengadaan Alat Penerangan Jalan	Kondisi Malam Hari yang berada dipegunungan karena gelap maka diperlukannya penerangan jalan	Suruh	Gamping	Desa Gamping	DINAS PERHUBUNGAN	76
76	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan	Terjadi tanah longsor di 5 titik ruas Jalan Poros Desa yang menyebabkan Badan Jalan menjadi sempit sehingga arus transportasi menjadi tidak lancar dan membahayakan pengguna jalan. Adapun Volume di 5 titik sebagai berikut 1. PxT (12 x 1,8 m) 2. PxT (15 x 2)m 3. PxT (30 x 2)m 4. PxT (12 x 2,5)m 5 PxT (20 x3)m	Suruh	Nglebo	RT 10, RT 11 RT 12 Dsn Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	77

77	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	#MPP Pembangunan Jalan Paving skala Lingkungan dan pelengkap nya (TPJ dan Saluran Air)	kondisi jalan rusak dan merupakan jalan akses pendidikan dan ekonomi warga sehingga berbahaya bagi pengguna jalan, ukuran 500 meter	Suruh	Gamping	Dusun Gandu	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	78
78	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dlam daerah Kabupaten /Kota	Pembangunan Sistem Drainase lingkungan	#MPP Pembangunan sistem Drainase lingkungan dan peningkatan saluran drainase lingkungan	belum ada bangunan drainase secara permanen dan masih dalam kondisi tanah ukuran 750 meter biaya Rp. 250.000.000,-	Suruh	Suruh	RT.31 RW.11 Dusun Gading	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	79

79	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten / Kota	Pembangunan Sistem Drainase lingkungan	#MPP Pembangunan sistem Drainase lingkungan dan peningkatan saluran drainase lingkungan	belum ada bangunan drainase dan masih berbentuk tanah sehingga ketika musim penghujan dapat membahayakan keamanan bangunan Jalan, ukuran 200 meter	Suruh	Suruh	RT.22 RW.09 Dusun Krajan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	80
----	---	--	--	--	--	---	--	-------	-------	--------------------------	---	----

80	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Rekonstruksi Jalan	#MPP Jalan dengan Kondisi Rusak Berat / Peningkatan Jalan	kondisi jalan rusak berat yang berada di sekitar rumah pemukiman warga yang merupakan juga jalan penghubung antar desa dan merupakan jalur ekonomi, pendidikan yang perlunya pembangunan pengaspalan jalan dengan aspal hotmix yang bervolume lebar 3.5 meter di sepanjang jalan 700 meter	Suruh	Gamping	Dusun Karangturi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	81
----	---	--	-------------------------------	---------------------------------------	--------------------	---	--	-------	---------	------------------	---	----

81	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dlam daerah Kabupaten / Kota	Pembangunan Sistem Drainase lingkungan	#MPP Pembangunan sistem Drainase lingkungan dan peningkatan saluran drainase lingkungan	jalan daerah dan belum ada bangunan drainase dan mengakibatkan terkikis bangunan jalannya ketika hujan, ukuran 200 meter	Suruh	Suruh	RT.22 RW.09 Dusun Krajan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	82
82	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dlam daerah Kabupaten / Kota	Pembangunan Sistem Drainase lingkungan	#MPP Pembangunan sistem Drainase lingkungan dan peningkatan saluran drainase lingkungan	Jalan Daerah masih berbentuk tanah ketika hujan berbahaya bagi keamanan bangunan jalan, ukuran 200 meter	Suruh	Suruh	RT.22 RW.09 Dusun Krajan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	83

83	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Rekonstruksi Jalan	#MPP Jalan dengan Kondisi Rusak Berat / Peningkatan Jalan	kondisi jalan di sekitar rumah pemukiman warga yang perlunya pembangunan pengerasan jalan dengan beton readymix yang bervolume lebar 3 meter di sepanjang jalan 300 meter	Suruh	Gamping	Dusun Sumberjo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	84
84	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dlam daerah Kabupaten /Kota	Pembangunan Sistem Drainase lingkungan	#MPP Pembangunan sistem Drainase lingkungan dan peningkatan saluran drainase lingkungan	Belum adanya sistem drainase di jalan, sehingga menyebabkan air mengalir dijalan sehingga mengakibatkan kerusakan jalan,	Suruh	Mlinjo	RT.14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	85

85	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	#MPP Pembangunan Jalan Paving skala Lingkungan dan pelengkap nya (TPJ dan Saluran Air)	berbentuk tanah dan menuju rumah ODGJ ukuran 250 meter	Suruh	Suruh	RT.11 Dusun Jatirejo	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	86
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam												
1	Ekonomi Kerakyatan Dan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumber nya dari Daerah	#MPP Bantuan Bibit Ternak (Kambing PE dan Kambing Lokal)	Selama ini yang ada di Desa Ngrandu masih	Suruh	Ngrandu	RT 19 RW 04 Dusun Depok	DINAS PETERNAKAN	1

	Jaring Pengaman Sosial	PERTANIAN	PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kabupaten/Kota Lain	Keterangan: 1 BIDANG EKONOMI; Proposal untuk segera dikirimkan ke Dinas Peternakan Kab. Trenggalek paling lambat sebelum pelaksanaan Musrenkab Th 2024; 1. Mohon tambahan lampir Proposal terkait : a. fotokopi KTP semua anggota (ktp yang dilampirkan hanya 3 Orang) 2. Mohon untuk mengidentifikasi anggota kelompok penerima yang masuk dalam DTKS, sebagai upaya penghapusan kemiskinan ekstrem (himbauan) 3. Sesuai arahan bupati, untuk fokus pada pemberdayaan ekonomi tarikan, Mohon sebelum pelaksanaan, dapat dipastikan pembeli produk/jasa, sehingga penerima program tidak kesulitan menjual produk/jasa. 4. Alokasi pagu dan volume usulan menyesuaikan ;	sebatas kambing pedaging dan masih belum terpenuhinya hasil dari susu perah kambing, sehingga dengan adanya bantuan kambing Saanen bisa menambah perekonomian warga dari hasil susu perah tersebut. Volume kebutuhan 55 ekor kambing.			Desa Ngrandu Kecamatan Suruh		
2	Ekonomi Kerakyatan Dan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah	#MPP Bantuan Bibit Ternak (Kambing PE dan Kambing Lokal)	Selama ini yang ada di Desa Ngrandu masih	Suruh	Ngrandu	RT 19 RW 04 Dusun Depok	DINAS PETERNAKAN	1

	Jaring Pengaman Sosial	PERTANIAN	PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kabupaten/Kota Lain	Keterangan: 1 BIDANG EKONOMI; Proposal untuk segera dikirimkan ke Dinas Peternakan Kab. Trenggalek paling lambat sebelum pelaksanaan Musrenkab Th 2024; 1. Mohon tambahan lampir Proposal terkait : a. fotokopi KTP semua anggota (ktp yang dilampirkan hanya 3 Orang) 2. Mohon untuk mengidentifikasi anggota kelompok penerima yang masuk dalam DTKS, sebagai upaya penghapusan kemiskinan ekstrem (himbauan) 3. Sesuai arahan bupati, untuk fokus pada pemberdayaan ekonomi tarikan, Mohon sebelum pelaksanaan, dapat dipastikan pembeli produk/jasa, sehingga penerima program tidak kesulitan menjual produk/jasa. 4. Alokasi pagu dan volume usulan menyesuaikan ;	sebatas kambing pedaging dan masih belum terpenuhinya hasil dari susu perah kambing, sehingga dengan adanya bantuan kambing Saanen bisa menambah perekonomian warga dari hasil susu perah tersebut. Volume kebutuhan 55 ekor kambing.			Desa Ngrandu Kecamatan Suruh		
3	Ekonomi Kerakyatan Dan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah	#MPP Bantuan Bibit Ternak (Kambing PE dan Kambing Lokal)	Bantuan bibit kambing PE sejumlah 55	Suruh	Nglebo	Kelompok Ternak ARGO	DINAS PETERNAKAN	2

	Jaring Pengaman Sosial	PERTANIAN	PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Kabupaten/Kota Lain	Keterangan: prioritas 2; Kelompok dimohon untuk segera membuat proposal dan dikirimkan segera ke Dinas Peternakan Kab. Trenggalek paling lambat sebelum pelaksanaan Musrenbangkab Tahun 2024; 1. Mohon untuk mengidentifikasi anggota kelompok penerima yang masuk dalam DTKS, sebagai upaya penghapusan kemiskinan ekstrem (himbauan) 2. Sesuai arahan bupati, untuk fokus pada pemberdayaan ekonomi tarikan, Mohon sebelum pelaksanaan, dapat dipastikan pembeli produk/jasa, sehingga penerima program tidak kesulitan menjual produk/jasa. 3. Alokasi pagu dan volume usulan menyesuaikan kapasitas fiskal daerah;	ekor			MENDO Desa Nglebo RT.6 RW. 2 Dusun Tawang		
4	Ekonomi Kerakyatan Dan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah	#MPP Bantuan Bibit Ternak (Kambing PE dan Kambing Lokal)	Bantuan bibit kambing PE sejumlah 55	Suruh	Nglebo	Kelompok Ternak ARGO	DINAS PETERNAKAN	2

	Jaring Pengam an Sosial	PERTANIAN	PENGEMBAN GAN SARANA PERTANIAN	Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Kabupaten/Kota Lain	Keterangan: prioritas 2; Kelompok dimohon untuk segera membuat proposal dan dikirimkan segera ke Dinas Peternakan Kab. Trenggalek paling lambat sebelum pelaksanaan Musrenbangkab Tahun 2024; 1. Mohon untuk mengidentifikasi anggota kelompok penerima yang masuk dalam DTKS, sebagai upaya penghapusan kemiskinan ekstrem (himbauan) 2. Sesuai arahan bupati, untuk fokus pada pemberdayaan ekonomi tarikan, Mohon sebelum pelaksanaan, dapat dipastikan pembeli produk/jasa, sehingga penerima program tidak kesulitan menjual produk/jasa. 3. Alokasi pagu dan volume usulan menyesuaikan kapasitas fiskal daerah;	ekor			MENDO Desa Nglebo RT.6 RW. 2 Dusun Tawang		
5	Ekonomi kerakyat an dan jaring pengama n sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN GAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	#MPP Bantuan Bibit Ternak (Kambing PE dan Kambing Lokal)	untukpengemb angan ekonomi maka diperlukannya dukungan untuk bibit kambing PE sejumlah 50 ekor	Suruh	Gampi ng	Desa Gamping	DINAS PETERNAK AN	3

6	Ekonomi kerakyat an dan jaring pengama n sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN GAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	#MPP Bantuan Bibit Ternak (Kambing PE dan Kambing Lokal)	kelompok ternak yang sangat membutuhkan bibit kambing PE. 100 ekor	Suruh	Gampi ng	Desa Gamping	DINAS PETERNAK AN	4
---	--	--	--	---	--	--	---	-------	-------------	-----------------	-------------------------	---

7	Ekonomi kerakyat an dan jaring pengama n sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	#MPP Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum di Objek Wisata	"Pembangunan Rest Area" Desa Wonokerto memiliki tempat strategis untuk pengadaan "Rest Area". Lokasi tersebut biasanya di jadikan tempat istirahatan orang-orang yang melakukan perjalan jauh, lokasi tersbut juga menampilkan pemandangan Wisata Tebing Lingga dari kejauhan. (Luas 100 m2)	Suruh	Wonok erto	Dusun Krajan RT 10 RW 01 Desa Wonokerto	DINAS PARIWISAT A DAN KEBUDAYA AN	5
---	--	---	---	--	--	---	---	-------	---------------	---	---	---

8	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	#MPP Bantuan Bibit Kambing lokal untuk masyarakat miskin (Peti Koin Bermantra - Keperantaraan Pasar)	Sebagian besar masyarakat Desa Nglebo banyak yang beternak Kambing. Beternak kambing menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam rangka membantu dan memberdayakan masyarakat miskin yang ingin beternak kambing, yang didapatkan dari menggaduh dari orang lain, perlu bantuan dari Pemerintah untuk masyarakat miskin tersebut. Kami mengajukan 300 bibit kambing untuk 150 pemanfaat	Suruh	Nglebo	Desa Nglebo	DINAS PETERNAKAN	7
---	--	--------------------------------------	--	---	---	--	--	-------	--------	-------------	------------------	---

9	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	#MPP Bantuan kolam, benih, pakan untuk Budidaya Ikan Lele	Masih minimnya warga yang membudidayakan ikan lele karena keterbatasan alat dan modal, sehingga dengan pengajuan bantuan kolam, benih dan pakannya diharapkan bisa menunjang dan menambah perekonomian warga di bidang perikanan.	Suruh	Ngrandu	RT 08 RW 02 Desa Ngrandu Kecamatan Suruh	DINAS PERIKANAN	8
10	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	#MPP Bantuan kolam, benih, pakan untuk Budidaya Ikan Nila	Belum adanya pembudidayaan ikan nila di Desa Mlinjon, karena terkendala modal usaha.	Suruh	Mlinjon	Desa Mlinjon	DINAS PERIKANAN	9

1 1	Ekonomi kerakyat an dan jaring pengama n sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAA N PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapa n Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	#MPP SEMBADA (Sayembara Even Mancing Bersama Eratkan Persaudaraan Warga)	Banyaknya warga masyarakat yang mempunyai hobi memancing tetapi belum ada wadah untuk agenda perlombaan.	Suruh	Mlinjo n	RT.14	DINAS PERIKANAN	10
1 2	Ekonomi kerakyat an dan jaring pengama n sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN GAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangun an Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	#MPP Pengadaan JITUT	Belum lancarnya distribusi air irigasi ke persawahan para petani.	Suruh	Mlinjo n	Desa Mlinjon, Wates	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	11

13	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	#MPP Pengadaan JUT	Kondisi jalan masih tanah dan rusak berat sehingga dengan dibangunnya rabat jalan diharapkan akan mempermudah sarana transportasi hasil pertanian. Volume kebutuhan 305 m x 2 m	Suruh	Ngrandu	RT 18 RW 04 Dusun Depok Desa Ngrandu Kecamatan Suruh	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	12
14	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	#MPP Pengadaan JUT	masih berbentuk tanah	Suruh	Suruh	RT.05 RW.02 Dusun Panjen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	13
15	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	#MPP Pengadaan JUT	masih berbentuk tanah ukuran 850 meter	Suruh	Suruh	RT.05,19 Dusun Panjen dan Dusun Jatirejo	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	14

16	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	#MPP Pengadaan JUT	kondisi rusak berat ukuran 800 meter x 2,5 meter	Suruh	Suruh	RT.25 RW.10 Dusun Gading	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	15
17	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	#MPP Pengadaan JUT	Akses yang masih sulit ke lahan untuk alat dan mesin pertanian, kendaraan transportasi untuk keperluan panen, dll.	Suruh	Mlinjon	RT.3	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	16

18	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	#MPP Pengadaan JUT	Kondisi jalan masih tanah dan rusak berat sehingga sangat sulit jika digunakan sebagai akses membawa hasil pertanian, sehingga jika dibangun jalan paving diharapkan lebih mudah untuk membawa hasil pertanian. Volume kebutuhan 150 m x 3 m.	Suruh	Ngrandu	RT 21 RW 05 Dusun Babadan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	17
----	--	--------------------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------	---	-------	---------	---------------------------	----------------------------	----

19	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	#MPP Pengadaan JUT	Pembangunan Jalan Usaha Tani, masyarakat desa wonokerto mayoritas adalah petani. permasalahan yang sering dialami adalah saat musim hujan untuk membawa hasil panen dari lahan menuju rumah kurangnya fasilitas jalan yang tidak bisa di tempuh sepeda ataupun mobil pengangkut barang. lokasi Dusun Krajan, Bangun, dan Jirak	Suruh	Wonokerto	Desa Wonokerto	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	18
----	--	--------------------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------	--	-------	-----------	----------------	----------------------------	----

20	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	#MPP Pengadaan JUT	Air meluap ke jalan dan badan jalan ketika musim penghujan sehingga perlu dibangun Drainase agar air tidak meluap (70 m X 1 mX 0,6 m)	Suruh	Puru	RT 05 RW 02 Ds.Puru	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	19
21	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	#MPP Pengadaan JUT	masih berbentuk tanah dan merupakan akses menuju pertanian masyarakat sepanjang 400 meter	Suruh	Suruh	RT.28 RW.10 Dusun Gading	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	20
22	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	#MPP Pengadaan JUT	keadaan tanah saat ini pada lokasi tersebut sangat membahayakan apalagi saat musim hujan tiba tanah tersebut mengalami kelongsoran (volume 75 m X 3 m)	Suruh	Puru	RT 09, RT 07, RT 05 Ds.Puru	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21

23	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	#MPP Pengadaan Japrod Perkebunan	Untuk meningkatkan kualitas akses jalan menuju lahan pertanian dibutuhkan akses jalan yang memadai. Mengingat jalan masih berupa jalan tanah. Volume yang diajukan : Panjang 500 m Lebar 2,5 M	Suruh	Nglebo	RT 13 RW 3 Dusun Salam	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	22
24	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	#MPP Pengadaan Dam Parit	belum ada dam parit sehingga sulit untuk mengalir sawah pertanian tadah hujan,	Suruh	Suruh	RT.20 RW.08 Dusun krajan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	23
25	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	#MPP Pengadaan Dam Parit	belum ada dam parit sehingga kesulitan mengalir air sawah tadah hujan	Suruh	Suruh	RT.28 RW.10 Dusun Gading	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	24

26	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	#MPP Pengadaan Dam Parit	belum ada dam parit untuk pengairan sawah tadah hujan	Suruh	Suruh	RT.28 RW.10 Dusun Gading	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	25
27	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	#MPP Pengadaan Dam Parit	belum ada dam parit untuk mengairi sawah tadah hujan	Suruh	Suruh	RT.22 RW.09 Dusun Krajan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	26
28	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	#MPP Pengadaan Dam Parit	belum ada dam parit untuk mengairi sawah tadah hujan	Suruh	Suruh	RT.11 RW.04 Dusun Jatirejo	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	27
29	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	#MPP Pengadaan Dam Parit	belum ada dam parit untuk mengairi sawah tadah hujan	Suruh	Suruh	RT.05 RW.02 Dusun Panjen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	28

30	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	#MPP Pengembangan Tanaman Holtikultura (Durian)	Adanya lahan kosong didalam lahan wisata yang belum ditanami tanaman holtikultura, sehingga kurang menarik minat wisatawan.	Suruh	Mlinjon	Lahan wisata	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	29
31	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	#MPP Pengembangan Tanaman Holtikultura (Durian)	Pengadaan Bibit Durian. Desa Wonokerto mayoritas masyarakat adalah petani, dalam menunjang perekonomian bibit tanaman atau buah - buahan sangat membantu perekonomian masyarakat	Suruh	Wonokerto	Desa Wonokerto	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	30

3 2	Ekonomi kerakyat an dan jaring pengama n sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN GAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	#MPP Pelatihan/ Sekolah Lapang / Bimtek (Pelatihan GAP Tanaman Padi, jagung, kedelai, ketela pohon, porang)	Pembinaan Kelompok Tani, Desa Wonokerto mempunyai 4 kelompok tani, masyarakat mayoritas adalah petani untuk memajukan perekonomian tentunya di butuhkan Sekolah Lapangan Peningkatan SDM kelompok tani didesa wonokerto	Suruh	Wonok erto	Desa Wonokerto	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	31
3 3	Ekonomi kerakyat an dan jaring pengama n sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN GAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	#MPP Pelatihan/ Sekolah Lapang / Bimtek (Pelatihan GAP Tanaman Padi, jagung, kedelai, ketela pohon, porang)	tidak ada tenaga ahli yang membina dan melatih para petani tentang bagaimana cara bertani yang berkualitas (BIMTEK) 3 kelompok	Suruh	Puru	Desa Puru	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	32

3 4	Ekonomi kerakyat an dan jaring pengama n sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN GAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	#MPP Bantuan Bibit Kambing lokal untuk masyarakat miskin (Peti Koin Bermantra - Keperantaraan Pasar)	40% warga masuk dalam kategori miskin sehingga dengan adanya bantuan ternak kambing yang akan diprioritaskan pada keluarga miskin dan diharapkan akan dapat meningkatkan taraf hidup kelompok keluarga miskin. Volume kebutuhan 50 ekor kambing.	Suruh	Ngrand u	Desa Ngrandu	DINAS PETERNAK AN	33
3 5	Ekonomi kerakyat an dan jaring pengama n sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN GAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	#MPP Bantuan Bibit Ternak (Kambing PE dan Kambing Lokal)	banyak pakan ternak belum termanfaatkan	Suruh	Mlinjo n	RT 34 Dusun Miri	DINAS PETERNAK AN	34

36	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	#MPP Pengadaan Mesin Pertanian (Alat Pengolah Pupuk Organik)	Masyarakat belum bisa mengolah pupuk dalam bentuk granul karena keterbatasan alat, sehingga dengan adanya bantuan pengadaan mesin pertanian (granulator) dapat mempermudah masyarakat dalam pembuatan pupuk organik yang berbentuk butiran (granule) dan akan menambah nilai tambah pada produk organik tersebut.	Suruh	Ngrandu	Desa Ngrandu	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	35
37	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	#MPP Pengadaan Mesin Pertanian (Alat Pengolah Pupuk Organik)	Mahalnya harga pupuk kimia, serta banyaknya limbah organik yang dapat dijadikan pupuk organik.	Suruh	Mlinjon	Wates	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	36

38	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	#MPP Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum di Objek Wisata	Belum tersedianya MCK di lokasi wisata.	Suruh	Mlinjon	Jurug Gue	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	37
39	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	#MPP Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum di Objek Wisata	Pembangunan Wisata Anak (Waterpark) Desa Wonokerto memiliki banyak sumber air bersih, dalam memajukan perekonomian masyarakat bisa memanfaatkan sumber air tersebut untuk pembangunan Wisata Anak (Waterpark) dengan adanya pembangunan tersebut akan memajukan perekonomian masyarakat sekitarnya.	Suruh	Wonokerto	Desa Wonokerto	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	38

40	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	#MPP Pelatihan Pembuatan Produk Makanan Olahan	Pelatihan Tata Boga untuk ketrampilan ibu ibu PKK Desa	Suruh	Gamping	Desa Gamping	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	40
----	--	--	--	--	---	--	--	-------	---------	--------------	--	----

41	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	#MPP Pelatihan Keterampilan Menjahit	Unuk meningkatkan pendapatan kaum perempuan di Desa Nglebo perlu adanya pelatihan dan ketrampilan. Dari hasil penggalan potensi masyarakat ada 20 perempuan yang berniat kursus pelatihan Menjahit. Untuk itu Pemerintah Desa Nglebo mengajukan pelatihan menjahit sebanyak 20 orang. dan Bantuan Mesin Jahit Sebanyak 20 Unit.	Suruh	Nglebo	Desa Nglebo	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	41
----	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	-------	--------	-------------	--	----

42	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	#MPP Pelatihan Keterampilan Menjahit	pelatihan ketrampilan menjahit bagi ibu rumah tangga sebagai penunjang kegiatan keluarga untuk mandiri bisa jahit	Suruh	Gamping	Desa Gamping	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	42
43	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	#MPP Bantuan Bibit Ternak (Kambing PE dan Kambing Lokal)	Pengadaan Bibit kambing dan Sekolah Lapangan untuk memajukan masyarakat yang mayoritas petani pengadaan bibit kambing dan SL sangatlah penting untuk peningkatan ekonomi dan SDM masyarakat	Suruh	Wonokerto	Desa Wonokerto	DINAS PETERNAKAN	43

44	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	#MPP Bantuan Bibit Ternak (Kambing PE dan Kambing Lokal)	karena hasil susu kambing masih banyak kekurangan di konsumen, kebutuhan kambing sebanyak 70 ekor	Suruh	Suruh	warga desa suruh	DINAS PETERNAKAN	44
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia												
1	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	#MPP Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas SD Keterangan: Prioritas 1; Dapat Diakomodir asalkan dapat memenuhi RC yang dipersyaratkan ; Usulan diterima dan diproses ketahap selanjutnya. Wajib dilengkapi Proposal. ;	Tanah sering longsor ketika musim penghujan tiba sehingga dapat mengganggu kegiatan siswa dalam proses KBM (Volume 150 m X 2 m) TPT SDN 1 Puru	Suruh	Puru	RT 18 RW 01 Ds.Puru	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDADAN OLAHRAGA	1
2	Ekonomi kerakyatan dan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	PROGRAM PENGELOLAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	#MPP Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	(musrena Keren) Pembangunan	Suruh	Wonokerto	Desa Wonokerto	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA	2

	jaring pengaman sosial	PENDIDIKAN	PENDIDIKAN	Dini (PAUD)		Keterangan: Prioritas 2; Usulan diterima, dengan pertimbangan ketersediaan lahan (diupayakan untuk sudah sertifikat). Bantuan berupa Hibah uang/Swakelola.; Usulan diterima dan diproses ketahap selanjutnya. Wajib dilengkapi Proposal.;	Taman bermain Ramah anak desa wonokerto				DAN OLAHRAGA	
3	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	#MPP Bimbingan Teknis/Pembekalan/ Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Peningkatan kapasitas Pemerintah desa wonokerto agar perangkat lebih memiliki kualitas dalam kinerjanya dan bisa lebih mendalami tupoksinya dalam aparaturn pemerintahan desa	Suruh	Wonokerto	Desa Wonokerto	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3
4	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	#MPP Bimbingan Teknis/Pembekalan/ Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	kurangnya SDM Perangkat Desa tentang pengelolaan administrasi dan peraturan-peraturan pemerintahan (BIMTEK) 11 Orang	Suruh	Puru	Desa Puru	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4

5	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	#MPP Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Manajemen pengelolaan administrasi BUMDesa yang belum profesional, transparan, dan akuntabel.	Suruh	Mlinjon	Balai Desa Mlinjon	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5
6	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	#MPP Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Manajemen pengelolaan administrasi BUMDesa yang belum profesional, transparan, dan akuntabel.	Suruh	Mlinjon	Desa Mlinjon	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6
7	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	#MPP Bimbingan Teknis / Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kurangnya SDM BPD tentang pengadministrasian dan peran serta BPD pada pemerintah Desa	Suruh	Puru	Desa Puru	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7

8	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	#MPP Bimbingan Teknis / Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	kurangnya SDM atau Pengetahuan BPD tentang administrasi dan peraturan pemerintahan (BIMTEK) 11 Orang	Suruh	Puru	Desa Puru	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8
---	---	---	--	---	---	---	--	-------	------	-----------	--	---

9	Ekonomi kerakyat an dan jaring pengama n sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYA AN LEMBAGA KEMASYARAK ATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan yang Bergerak di Bidang Pemberdaya an Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdaya an Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	#MPP Bimbingan Teknis Manajemen/Pengelolaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan	Pembinaan Lembaga Desa Wonokerto dalam kelembagaan desa wonokerto sangat banyak kekurangan dalam penguatan atau peningkatan kapasitas untuk kinerja tupoksi, sehingga dalam pembinaan lembaga desa ini akan lebih meningkatkan kualitas kelembagaan desa khususnya Desa Wonokerto	Suruh	Wonok erto	Desa Wonokerto	DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN DESA	9
---	--	--	---	--	---	---	---	-------	---------------	-------------------	---	---

10	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	#MPP Bimbingan Teknis Manajemen/Pengelolaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan	tidak ada tenaga ahli yang membina dan melatih pemuda karang taruna (BIMTEK)	Suruh	Puru	Desa Puru	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10
----	--	---	---	--	--	---	--	-------	------	-----------	--	----

1 1	Ekonomi kerakyat an dan jaring pengama n sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYA AN LEMBAGA KEMASYARAK ATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan yang Bergerak di Bidang Pemberdaya an Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdaya an Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	#MPP Bantuan Alat Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi.	belum adanya alat teknologi tepat guna, masyarakat masih tradisional dalam penerapannya.	Suruh	Mlinjo n	Desa Mlinjon	DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN DESA	11
--------	--	--	---	--	---	---	---	-------	-------------	-----------------	---	----

1 2	Ekonomi kerakyat an dan jaring pengama n sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYA AN LEMBAGA KEMASYARAK ATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan yang Bergerak di Bidang Pemberdaya an Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdaya an Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	#MPP Bantuan Alat Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi.	alat pengering coklat pada kelompoktani.5 unit	Suruh	Gampi ng	desa gamping	DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN DESA	12
--------	--	--	---	--	---	---	---	-------	-------------	-----------------	---	----

1 3	Ekonomi kerakyat an dan jaring pengama n sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYA AN LEMBAGA KEMASYARAK ATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan yang Bergerak di Bidang Pemberdaya an Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdaya an Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	#MPP Bantuan Alat Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi.	kurangnya alat yang canggih untuk proses pembuatan anyaman reyeng bagi warga masyarakat (20 unit)	Suruh	Puru	Desa Puru	DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN DESA	13
--------	--	--	---	--	---	---	--	-------	------	-----------	---	----

14	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	#MPP Bantuan Alat Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi.	dalam pengembangan ekonomi desa untuk menunjang peternak dalam beternak kambing maka diperlukannya alasilase (Silage Baler Machine).	Suruh	Gamping	Desa Gamping	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14
----	--	---	---	--	---	--	--	-------	---------	--------------	--	----

15	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	#MPP Fasilitasi Pengembangan/ Pembuatan Aplikasi Pelayanan Publik	Belum optimalnya pelayanan publik sehingga perlu dibantu aplikasi pelayanan publik dalam mempercepat pelayanan.	Suruh	Mlinjon	Desa Mlinjon	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15
16	Ekonomi kerakyatan dan jaring pengaman sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	#MPP Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengaan Kursi roda. dalam bidang kesehatan desa wonokerto masih minim untuk alat kesehatan seperti kursi roda untuk sebagai fasilitas pelayanan kesehatan (25 Unit)	Suruh	Wonokerto	Desa Wonokerto	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	16
17	Ekonomi kerakyatan dan jaring pengaman sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	#MPP Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas SD (Paving Halaman, MCK/ Toilet, Pagar Sekolah, TPB, Tempat Pakir dan Mushola)	Masih kurangnya sarana dan prasarana di Sekolah Dasar sehingga siswa siswa kurang nyaman berada dalam lingkungan sekolah.	Suruh	Mlinjon	SDN 5 Mlinjon	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	17

18	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	#MPP Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas SD (Paving Halaman, MCK/ Toilet, Pagar Sekolah, TPB, Tempat Pakir dan Mushola)	Kurangnya fasilitas pendukung di SD.	Suruh	Mlinjon	SDN 2 Mlinjon	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDADAN OLAHRAGA	18
19	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	#MPP Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Ruang kelas SD dalam kondisi yang memprihatinkan karena termakan usia dan belum ada rehabilitasi.	Suruh	Mlinjon	SDN 6 MLINJON	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDADAN OLAHRAGA	19
20	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	#MPP Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Belum lengkapnya fasilitas PAUD.	Suruh	Mlinjon	Paud Mitra Desa Mlinjon	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDADAN OLAHRAGA	20
21	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	#MPP Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kurangnya fasilitas pendukung PAUD	Suruh	Mlinjon	PAUD Mitra	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDADAN OLAHRAGA	21

2 2	Ekonomi kerakyat an dan jaring pengama n sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KEBUDAYAA N	PROGRAM PENGEMBAN GAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal	#MPP Peningkatan Kapasitas SDM Seni Budaya	Banyaknya pekerja seni dan kelompok seni di desa yang belum optimal.	Suruh	Mlinjo n	Desa Mlinjon	DINAS PARIWISAT A DAN KEBUDAYA AN	22
2 3	Ekonomi kerakyat an dan jaring pengama n sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KEBUDAYAA N	PROGRAM PENGEMBAN GAN KESENIAN TRADISIONAL	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	#MPP Peningkatan kapasitas tatakelola lembaga kesenian tradisional	Kurang terorganisirnya lembaga kesenian tradisional di desa.	Suruh	Mlinjo n	Desa Mlinjon	DINAS PARIWISAT A DAN KEBUDAYA AN	23
2 4	Ekonomi kerakyat an dan jaring pengama n sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAA N PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	#MPP Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Alat praktik dan peraga paud yang masih sedikit belum bisa maksimal.	Suruh	Mlinjo n	PAUD Mitra	DINAS PENDIDIKA N, PEMUDA DAN OLAHRAGA	24

25	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAA N DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	#MPP Rintisan wirausaha pemula pedesaan berdayasaing	Banyaknya pemuda yang bekerja di luar kota, sehingga perlu adanya lapangan wirausaha.	Suruh	Mlinjon	Desa Mlinjon	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDADAN OLAHRAGA	25
26	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasanyamasyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	#MPP Bimbingan Teknis/Pembekalan/ Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kurang profesional, penguasaan Teknologi Informasi dan Komputer yang belum terampil, dan disiplin dalam hal manajemen pemerintahan desa.	Suruh	Mlinjon	Desa Mlinjon	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	26

27	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	#MPP Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	(Musrena Keren) pembangunan Taman bermain ramah anak desa wonokerto	Suruh	Wonokerto	Desa Wonokerto	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDADAN OLAHRAGA	27
----	--	---------------------------------------	--------------------------------	--	---	--	---	-------	-----------	----------------	--------------------------------------	----

28	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAA N DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	#MPP Rintisan wirausaha pemula pedesaan berdayasaing	Dalam rangka mendukung pendapatan Asli Desa melalui pengembangan Potensi Wisata di Desa Nglebo, telah ada Wisata Tebing Lingga yang perlu dukungan pengembangan melalui penggalian Potensi Produk Unggulan Desa. Untuk itu perlu adanya dukungan melalui pelatihan pengembangan produk Desa. Adapaun kegiatan yang kami ajukan ssb; 1. Pelatihan pembuana kue dan olahan makanan = 30 Orang 2. Pelatihan pembuatan Branding Produk Desa = 30 Orang 3. Pelatihan pemasaran melalui teknologi Digital = 20 oarang	Suruh	Nglebo	Desa Nglebo	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDADAN OLAHRAGA	28
----	--	---	--	--	---	--	---	-------	--------	-------------	--------------------------------------	----

29	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	#MPP Bimbingan Teknis/Pembekalan/Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Untuk meminimalisir adanya permasalahan yang muncul di desa perlu dilaksanakan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif.	Suruh	Mlinjon	Balai Desa Mlinjon	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	29
30	Ekonomi kerakyatan dan jejaring pengamanaan sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	#MPP Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas SD (Paving Halaman, MCK/ Toilet, Pagar Sekolah, TPB, Tempat Pakir dan Mushola)	Kondisi jalan masih tanah dan licin yang sangat bahaya bagi pengguna jalan. dengan ukuran lebar jalan 3 meter dan panjang 200 meter	Suruh	Gamping	SDN 2 Gamping	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	30

31	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	#MPP Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas SD (Paving Halaman, MCK/ Toilet, Pagar Sekolah, TPB, Tempat Pakir dan Mushola)	masih kurang terpenuhinya sarana prasarana di SDN 1 Puru yaitu Pagar Sekolah, infrastruktur dalam lingkungan sekolah memiliki peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar, infrastruktur yang memadai dapat memberikan semangat dan kenyamanan serta keselamatan selama berada disekolah. volume (265 m x 2 m)	Suruh	Puru	RT 18 RW 01 Dsn.Krajan Banaran Desa Puru	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDADAN OLAHRAGA	31
----	--	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	-------	------	--	--------------------------------------	----

3 2	Ekonomi kerakyat an dan jaring pengama n sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	#MPP Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	didesa gamping ada 4 paud yang sangat membutuhkan fasilitas taman bermain anak.maka diperlukannya untuk taman bermain anak	Suruh	Gampi ng	Desa gamping	DINAS PENDIDIKA N, PEMUDA DAN OLAHRAGA	32
3 3	Ekonomi kerakyat an dan jaring pengama n sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandanga n Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	#MPP Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Kursi roda untuk penyandang disabilitas sejumlah 8	Suruh	Gampi ng	Desa Gamping	DINAS SOSIAL, PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN PERLINDUN GAN ANAK	33

3 4	Ekonomi kerakyat an dan jaring pengama n sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandanga n Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	#MPP Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	belum punya dan sebagai sarana bagi penyandang Disabilitas, sebanyak 2 buah	Suruh	Suruh	Desa Suruh	DINAS SOSIAL, PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN PERLINDUN GAN ANAK	34
3 5	Ekonomi kerakyat an dan jaring pengama n sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandanga n Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	#MPP Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	perlu bantuan kursi roda bagi diisabilitas warga suruh sebanyak 5 buah	Suruh	Suruh	Desa Suruh	DINAS SOSIAL, PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN PERLINDUN GAN ANAK	35

36	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	#MPP Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	perlunya bantuan alat dengar bagi anak disabilitas sebanyak 1 buah	Suruh	Suruh	RT.28 RW.10 Dusun Gading	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	36
Musrena Keren												
1	Ekonomi Kerakyatan Dan Jaringan Pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	#MPP Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan Melalui Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Musrena Keren)	semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat, kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah, sampah sebagai tempat berkembang dan sarang dari serangga dan tikus, menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, air, dan udara, menjadi sumber dan	Suruh	Mlinjon	Desa Mlinjon	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1

				Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Keterangan: Prioritas 1; Rekomendasi di akomodir, tetapi wajib menyampaikan Proposal; Usulan diterima dan diproses ketahap selanjutnya. Wajib dilengkapi Proposal.;	tempat hidup kuman.					
2	Ekonomi Kerakyat an Dan Jaring Pengama n Sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandanga n Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	#MPP Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan Melalui Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Musrena Keren) Keterangan: prioritas 2; usulan diakomodir melalui teknokratik maupun kerjasama dengan UPT Dinsos Prov. Jatim dan Balai Besar Kemensos RI; Usulan diterima dan diproses ke tahap selanjutnya;	masih adanya warga disabilitas yang perlu bimbingan dan pendampingan	Suruh	Suruh	desa suruh	DINAS SOSIAL, PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN PERLINDUN GAN ANAK	2

3	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	#MPP Pendidikan Politik Untuk Perempuan (Sekolah Perempuan) (Musrena Keren)	pelatihan sekolah perempuan hebat atau penyamaan status gender	Suruh	Gamping	Desa gamping	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3
---	---	-----------------------------	--	---	---	---	--	-------	---------	--------------	-----------------------------------	---

4	Ekonomi kerakyat an dan jaring pengama n sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYA AN LEMBAGA KEMASYARAK ATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan yang Bergerak di Bidang Pemberdaya an Desa dan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdaya an Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatkan Pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkwalitas dan berdaya saing	#MPP Pelatihan Petani Perempuan Milenial untuk Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan (Musrena Keren)	Pelatihan Budidaya hidroponik	Suruh	Gampi ng	Desagamp ing	DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN DESA	4
---	--	--	---	--	--	--	-------------------------------------	-------	-------------	-----------------	---	---

5	Ekonomi kerakyat an dan jaring pengama n sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandanga n Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	#MPP Pendampingan pembentukan layanan terpadu difabel di desa/kelurahan	Perlunya pengutan dan pendampingan kaum disabilitas di Desa Nglebo, agar kaum tersebut bisa berdaya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan peningkatan ketrampilan untuk penigkatan kesejahteraan. Bantuan yang diajukan sebagai berikut : 1. Pelatihan ketrampilan 5 orang Disabilitas 2. Bantuan Kursi Roda untuk penyandang Disabilitas (Usulan Musrenakeren)	Suruh	Nglebo	Desa NGlebo	DINAS SOSIAL, PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN PERLINDUN GAN ANAK	5
---	--	---	-----------------------------------	--	--	--	--	-------	--------	----------------	--	---

6	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	#MPP Bantuan Bibit Kambing lokal untuk masyarakat miskin (Peti Koin Bermantra - Keperantaraan Pasar)	(Musrena Keren) Bantuan bibit ternak untuk masyarakat yang kurang mampu untuk menunjang perekonomian. (60 org)	Suruh	Wonokerto	Desa Wonokerto	DINAS PETERNAKAN	6
---	--	--------------------------------------	--	---	---	--	--	-------	-----------	----------------	------------------	---

7	Ekonomi kerakyat an dan jaring pengama n sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYA AN LEMBAGA KEMASYARAK ATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan yang Bergerak di Bidang Pemberdaya an Desa dan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdaya an Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatkan Pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkwalitas dan berdaya saing	#MPP Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader PKK Desa/Kelurahan (Musrena Keren)	perlu pelatihan khusus tentang kreatifitas dan kemampuan Ibu PKK desa dalam rangka ikut berperan aktif dalam pembangunan dan kemajuan Perempuan di desa	Suruh	Suruh	PKK Desa Suruh	DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN DESA	7
---	--	--	---	--	--	---	--	-------	-------	-------------------	---	---

8	Ekonomi kerakyat an dan jaring pengama n sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYA AN LEMBAGA KEMASYARAK ATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan yang Bergerak di Bidang Pemberdaya an Desa dan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdaya an Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatkan Pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkwalitas dan berdaya saing	#MPP Pelatihan Keterampilan Inklusi (Musrena Keren)	ada beberapa anak inklusi / Disabilitas yang perlu pendampingan	Suruh	Suruh	Desa Suruh	DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN DESA	8
---	--	--	---	--	--	---	---	-------	-------	---------------	---	---

9	Ekonomi kerakyat an dan jaring pengama n sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KEPEMUDAA N DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBAN GAN KAPASITAS DAYA SAIN G KEPEMUDAAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	#MPP Rintisan wirausaha pemula pedesaan berdayasaing	(Musrena Keren) Bantuan alat usaha (Gerobak) untuk kelompok rentan desa wonokerto	Suruh	Wonok erto	Desa Wonokerto	DINAS PENDIDIKA N, PEMUDA DAN OLAHRAGA	9
---	--	---	--	---	---	--	--	-------	---------------	-------------------	--	---

10	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatkan Pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkwalitas dan berdayasaing	#MPP Pelatihan Keterampilan Inklusi (Musrena Keren)	Pada era ini banyak sekali kelompok disabilitas yang memiliki skill/ketrampilan, untuk itu maka sangat dibutuhkan pelatihan bagi kelompok tersebut untuk menyalurkan ketrampilannya	Suruh	Puru	Desa Puru	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10
----	--	---	---	---	---	---	---	-------	------	-----------	--	----

1 1	Ekonomi kerakyat an dan jaring pengama n sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYA AN LEMBAGA KEMASYARAK ATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan yang Bergerak di Bidang Pemberdaya an Desa dan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdaya an Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatkan Pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkwalitas dan berdaya saing	#MPP Pelatihan Keterampilan Inklusi (Musrena Keren)	Mengingat masih belum banyak sekolah inklusif yang tersedia untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan juga fasilitas umum ataupun pelatihan khusus bagi penyandang disabilitas, sehingga dengan adanya petahihan dan keterampilan dan kewirausahaan dan bantuan alat bagi penyandang disabilitas diharapkan dapat menambah wawsan dan kreatifitas bagi penyandang disabilitas. Volume kebutuhan 3 orang.	Suruh	Ngrand u	Desa Ngrandu	DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN DESA	11
--------	--	--	---	--	--	---	---	-------	-------------	-----------------	---	----

1 2	Ekonomi kerakyat an dan jaring pengama n sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYA AN LEMBAGA KEMASYARAK ATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan yang Bergerak di Bidang Pemberdaya an Desa dan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdaya an Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatkan Pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkwalitas dan berdaya saing	#MPP Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan Melalui Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Musrena Keren)	perlunya pengolahan dan pengelolaan sampah secara maksimal	Suruh	Suruh	kelompok perempua n masyarak at desa suruh	DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN DESA	12
--------	--	--	---	--	--	---	---	-------	-------	---	---	----

13	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	#MPP Pelatihan / Sekolah Lapang / Bimtek (Pelatihan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	(Musrena Keren) Pelatihan budidaya tanaman Hidroponik desa wonokerto	Suruh	Wonokerto	Desa Wonokerto	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	13
14	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	#MPP Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	sambungan kaki disabilitas sangat diperlukan karena cacat pada kaki	Suruh	Gamping	Desa Gamping	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14

15	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	#MPP Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	(Musrena Keren) Kursi Roda Untuk disabilitas. Desa wonokerto membutuhkan alat bantu Kursi Roda untuk penyandang disabilitas (25 buah)	Suruh	Wonokerto	Desa Wonokerto	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15
----	--	-----------------------------------	-----------------------------	--	-----------------------	--	---	-------	-----------	----------------	--	----

16	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatkan Pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkwalitas dan berdayasaing	#MPP Pelatihan Petani Perempuan Milenial untuk Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan (Musrena Keren)	Banyaknya Perempuan Kepala Keluarga di Desa Mlinjon yang mempunyai anak yatim dengan usia dibawah 10 tahun. Hal ini harus ditunjang dengan kemampuan secara ekonomi agar tidak bergantung kepada pihak lain dalam menghidupi keluaganya. Usulan yang diharapkan mereka mendapat bantuan kambing dan kandang serta pelatihan pengelolaan kandang. Sasaran dari kegiatan ini adalah kelompok perempuan janda yatim	Suruh	Mlinjon	Desa Mlinjon Kecamatan Suruh	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16
----	--	---	---	---	---	--	--	-------	---------	------------------------------	--	----

17	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	#MPP Pelatihan Pembuatan Kerajinan	(Musrena Keren) Pelatihan daur ulang sampah untuk perempuan desa wonokerto	Suruh	Wonokerto	Desa Wonokerto	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	17
----	--	--	--	--	---	------------------------------------	--	-------	-----------	----------------	--	----

18	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatkan Pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkwalitas dan berdayasaing	#MPP Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan Melalui Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Musrena Keren)	perlu pelatihan khusus tentang kreatifitas dan kemampuan kewirausahaan menjahit desa dalam rangka ikut berperan aktif dalam pembangunan dan kemajuan Perempuan di desa	Suruh	Gamping	Desa Gamping	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18
----	--	---	---	---	---	---	--	-------	---------	--------------	--	----

19	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimtek dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	#MPP Pelatihan pembuatan souvenir khas trenggalek (Bambu, Kulit, Kayu) Peti Koin Bermantra - Keperantaraan Pasar	(Musrena Keren) Pelatihan Membuat Souvenir. Sebagian warga masyarakat Wonokerto adalah pengrajin, untuk meningkatkan kualitas SDM tentunya membutuhkan pelatihan tertentu untuk menunjang perekonomian pengrajin tersebut.	Suruh	Wonokerto	Desa Wonokerto	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	19
----	--	---------------------------------------	---	---	--	--	--	-------	-----------	----------------	---------------------------------	----

20	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatkan Pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkwalitas dan berdayasaing	#MPP Pelatihan Keterampilan Inklusi (Musrena Keren)	masih perlu pendampingan dan bimbingan bagi warga penyandang disabilitas	Suruh	Suruh	desa suruh	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20
----	--	---	---	---	---	---	--	-------	-------	------------	--	----

21	Ekonomi kerakyatan dan jaringan pengamansosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	#MPP Pelatihan Pembuatan Kerajinan	(Musrena Keren) Pelatihan Keterampilan dan wirausaha dan bantuan alat untuk disabilitas desa Wonokerto. (2 org)	Suruh	Wonokerto	Desa Wonokerto	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	21
----	--	--	--	--	---	------------------------------------	---	-------	-----------	----------------	--	----

2 2	Ekonomi kerakyat an dan jaring pengama n sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYA AN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdaya an Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaa n dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	#MPP Pelatihan Keterampilan Menjahit	(Musrena Keren) Pelatihan Kewirausahaan Menjahit dan Pengajuan bantuan alat untuk perempuan untuk memajukan SDM dan Perekonomian masyarakat. (10 org)	Suruh	Wonok erto	Desa Wonokerto	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGAN GAN	22
2 3	Ekonomi kerakyat an dan jaring pengama n sosial	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KEPEMUDAA N DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBAN GAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	#MPP Rintisan wirausaha pemula pedesaan berdayasaing	(Musrena Keren) Bantuan Alat Usaha (Gerobak) untuk desa wonokerto untuk menunjang kelompok rentan yang berwirausaha. (7 org)	Suruh	Wonok erto	Desa Wonokerto	DINAS PENDIDIKA N, PEMUDA DAN OLAHRAGA	23

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Mengacu pada Visi RPJP Nasional 2005-2025 adalah : **“INDONESIA YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR”**, RPJP Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional, sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020- 2025 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sedangkan menurut periode RPJMN keempat (2020-2025), pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sedangkan menurut RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 bahwa Tujuan pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 adalah : **“MEWUJUDKAN PROVINSI JAWA TIMUR PUSAT AGROBISNIS TERKEMUKA, BERDAYA SAING GLOBAL DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI LANDASAN BAGI TAHAP PEMBANGUNAN BERIKUTNYA MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”**.

Visi pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah : **“TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK SEJAHTERA DAN BERAKHLAK”**. Visi tersebut diwujudkan melalui penerapan kebijakan dan pelaksanaan program secara terfokus dan bertahap, dengan

memberikan prioritas utama pada kebijakan dan program yang bernilai strategis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta rangkaian aturan perundangan terkait lainnya. Untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah periode 20 tahun mendatang.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, harus memperhatikan dan berpedoman pada visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tertuang pada RPJP Nasional dan sesuai dengan tema RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 yaitu **“TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU MELALUI EKONOMI INKLUSIF, SUMBERDAYA MANUSIA KREATIF DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)”**

Sebagai dokumen resmi daerah, RPJMD secara umum mempunyai nilai strategis, antara lain:

- a. Pedoman pembangunan di daerah selama 5 (lima) tahun;
- b. Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD);
- c. Alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappedalitbang;
- d. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah; dan
- e. Pedoman evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Suruh berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek dengan Tema Pembangunan Daerah pada Tahun 2024 diarahkan pada tema : **“Melestarikan Lingkungan, Mendekatkan Pelayanan Dan Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem ”**.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran hendaknya dalam bentuk kuantitatif agar lebih terukur, sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien .

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 merupakan dokumen pendukung perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap

lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

VISI :

Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumberdaya Manusia Kreatif Dan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

MISI :

1. Memastikan UMKM Naik Kelas Serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian Dan Perikanan Yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru Yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan Dan Ekonomi Pesantren;
2. Mewujudkan Trenggalek Sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar);
4. Mewujudkan Infrastruktur Yang Handal Dan Berwawasan Lingkungan.

Sebagai Perangkat Daerah kecamatan Suruh mendukung misi Bupati dan wakil Bupati Terpilih periode tahun 2021-2026 yaitu misi yang ke 3 (tiga) Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar).

Prioritas dan arah kebijakan Pembangunan Daerah yang berdasarkan pada tema di atas adalah dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 diarahkan dalam 3 (tiga) Prioritas Pembangunan, yaitu:

- Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat;
- Ekonomi kerakyatan dan jaring pengaman sosial.

Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan umum yang akan dicapai dalam 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Keterkaitan Misi dengan Tujuan Rencana Strategis
Tahun 2021-2026 Kecamatan Suruh

Misi	Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat daerah	Indikator Tujuan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator Tujuan
Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Tim Penilaian Internal (TPI) Reformasi Birokrasi
	Mewujudkan sinergitas pelayanan yang prima berbasis big data	Indeks Sinergitas Kecamatan	Hasil Penilaian Tim

Sesuai dengan Tujuan Rencana Strategis kecamatan Suruh pada Rencana Kerja kecamatan Suruh pada tahun 2024 adalah :

Tabel 3.2
Tujuan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 pada Rencana Kerja
Kecamatan Suruh Tahun 2024

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat daerah	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan		
		Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Tahun 2023	Tahun 2024
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Hasil Penilaian Tim Penilaian Internal (TPI) Reformasi Birokrasi	79,17	79,5	80,00
Mewujudkan sinergitas pelayanan yang prima berbasis big data	Hasil Penilaian Tim	81,73	73,125	73,125

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah secara nyata dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan). Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran pengawasan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan kinerja organisasi dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. Dengan demikian apabila seluruh kegiatan yang ditetapkan telah dilaksanakan, diharapkan sasaran kinerja terkait dapat dicapai.

Sesuai dengan Sasaran Rencana Strategis kecamatan Suruh pada Rencana Kerja kecamatan Suruh pada tahun 2024 adalah :

Tabel 3.3
Sasaran Rencana Strategis Tahun 2021-2026 pada Rencana Kerja Kecamatan Suruh Tahun 2024

Sasaran RENSTRA	Indikator Sasaran	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran		
			Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Tahun 2023	Tahun 2024
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	Hasil penilaian dari Inspektorat	83,66(A)	84(A)	84,5 (A)
Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey	86,22	86	86,5

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, pada tahun 2024 Kecamatan Suruh akan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pada Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 sampai
disini belum

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
13	Penyediaan Bahan/Material
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
9	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
24	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
10	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
25	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
26	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
11	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
27	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
28	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
29	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
13	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
30	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
31	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Suruh 2024, sebagai penjabaran rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2024, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten tahun 2021-2026. Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku. Sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dapat dirasakan sampai kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan

Rencana Kerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek tahun 2024 memuat program dan kegiatan pelaksanaan program Kecamatan Suruh yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Sedangkan rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan Indikatif Kecamatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 adalah sebagaimana table berikut :

Tabel 4.1

Program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan Indikatif

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN SURUH KAB. TRENGGALEK
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN SURUH						2.389.487.000,00							2.414.035.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.389.487.000,00							2.414.035.000,00	
	7.01	KECAMATAN						2.389.487.000,00							2.414.035.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	-			100 %	2.311.494.337,00						-	2.314.035.000,00	

	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	-			61 dokumen	1.730.582,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Aparatur Kecamatan Suruh	-	3.000.000,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen	953.586,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Aparatur Kecamatan Suruh		1.500.000,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan				46 Laporan	776.996,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Aparatur Kecamatan Suruh		1.500.000,00	KECAMATAN SURUH

			<i>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>													
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan</i>	-			100 %	2.169.654.761,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Aparatur Kecamatan Suruh	-	2.059.714.652,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

1	2	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	2.108.109.700,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Aparatur Kecamatan Suruh		1.979.394.652,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				50 Dokumen	60.150.000,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Aparatur Kecamatan Suruh		77.820.000,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				292 Dokumen	953.586,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Aparatur Kecamatan Suruh		1.000.000,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				38 Laporan	441.475,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Aparatur Kecamatan Suruh		1.500.000,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Yang diselesaikan	-			100 %	953.586,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Aparatur Kecamatan Suruh	-	2.000.000,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NOKODE		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				27 Laporan	953.586,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Aparatur Kecamatan Suruh		2.000.000,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	-			100 %	441.475,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Aparatur Kecamatan Suruh	-	2.000.000,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				53 Dokumen	441.475,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Aparatur Kecamatan Suruh		2.000.000,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	-			100 %	56.739.317,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Aparatur Kecamatan Suruh	-	112.798.000,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1.298.946,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Aparatur Kecamatan Suruh		6.000.000,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4.058.471,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Aparatur Kecamatan Suruh		15.000.000,00	KECAMATAN SURUH

1	2	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	-				100 %	5.186.261,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Aparatur Kecamatan Suruh	-	30.000.000,00	KECAMATAN SURUH
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	5.186.261,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Aparatur Kecamatan Suruh		30.000.000,00	KECAMATAN SURUH
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	-				100 %	52.117.800,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Aparatur Kecamatan Suruh	-	62.522.348,00	KECAMATAN SURUH
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					36 Laporan	20.655.000,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Aparatur Kecamatan Suruh		23.655.000,00	KECAMATAN SURUH

7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	2.250.000,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Aparatur Kecamatan Suruh		7.254.548,00	KECAMATAN SURUH
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															

NOKODE		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	29.212.800,00	- Kab. Trenggalek, Suruh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Aparatur Kecamatan Suruh		31.612.800,00	KECAMATAN SURUH

	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	-				100 %	24.670.555,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Aparatur Kecamatan Suruh	-	42.000.000,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					11 Unit	22.572.755,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Aparatur Kecamatan Suruh		37.000.000,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					6 Unit	2.097.800,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Aparatur Kecamatan Suruh		5.000.000,00	KECAMATAN SURUH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	-				100 %	54.966.080,00						-	70.152.000,00	

7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	-				2 Laporan	21.770.394,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Desa dan Kecamatan Suruh	-	15.000.000,00	KECAMATAN SURUH
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															

NOKODE		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	21.770.394,00	- Kab. Trenggalek, Suruh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Desa dan Kecamatan Suruh		15.000.000,00	KECAMATAN SURUH

	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	-			14 Laporan	33.195.686,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Masyarakat Kecamatan Suruh	-	55.152.000,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	1.960.148,00	- Kab. Trenggalek, Suruh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Masyarakat Kecamatan Suruh		2.000.000,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	31.235.538,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Masyarakat Kecamatan Suruh		53.152.000,00	KECAMATAN SURUH
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	-			100 %	5.698.849,00						-	9.750.000,00	

	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang disusun	-			2 Laporan	5.698.849,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Masyarakat Kecamatan Suruh	-	9.750.000,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NOKODE		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	5.698.849,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Masyarakat Kecamatan Suruh		9.750.000,00	KECAMATAN SURUH
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	-			100 %	9.910.959,00						-	11.848.000,00	

		UMUM														
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	-			14 Laporan	9.910.959,00			-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Masyarakat Kecamatan Suruh	-	11.848.000,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	8.321.650,00	- Kab. Trenggalek, Suruh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Masyarakat Kecamatan Suruh		10.000.000,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	1.589.309,00	- Kab. Trenggalek, Suruh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Masyarakat Kecamatan Suruh		1.848.000,00	KECAMATAN SURUH

5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	-			100 %	7.416.775,00								8.250.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	-			24 Laporan	7.416.775,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Pemerintah Desa Kecamatan Suruh	-		8.250.000,00	KECAMATAN SURUH

NOKODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	2.913.733,00	- Kab. Trenggalek, Suruh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Pemerintah Desa Kecamatan Suruh		3.000.000,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	4.503.042,00	- Kab. Trenggalek, Suruh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Pemerintah Desa Kecamatan Suruh		5.250.000,00	KECAMATAN SURUH
	J U M L A H							2.389.487.000,00							2.414.035.000,00	

BAB V PENUTUP

Renja Kecamatan Suruh 2024, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2024. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 yang telah diselaraskan dengan RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan RPJMN Tahun 2020-2024, maka segenap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Renja Kecamatan Suruh Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 kepada semua stakeholder pembangunan. Untuk mengoperasionalkan program dan kegiatan yang ada di Renja perlu didukung oleh (1) Komitmen dari kepemimpinan daerah yang berakhlak mulia, kapabel, berkualitas dan demokratis; (2) Good Governance and Clean Government; (3) Konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (4) Keberpihakan kepada rakyat; (5) Partisipasi aktif dari masyarakat, media massa dan pihak swasta; serta (6) Mekanisme kontrol dan pengawasan serta akuntabilitas publik yang baik. Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Trenggalek selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Daerah juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten Trenggalek sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

Renja memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku. Sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dapat dirasakan sampai kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek tahun 2024 yang memuat program dan kegiatan pelaksanaan program Kecamatan Suruh yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024. Selain itu dapat dijadikan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar senantiasa selaras dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya

Pada akhirnya, Renja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524 199703 1 001